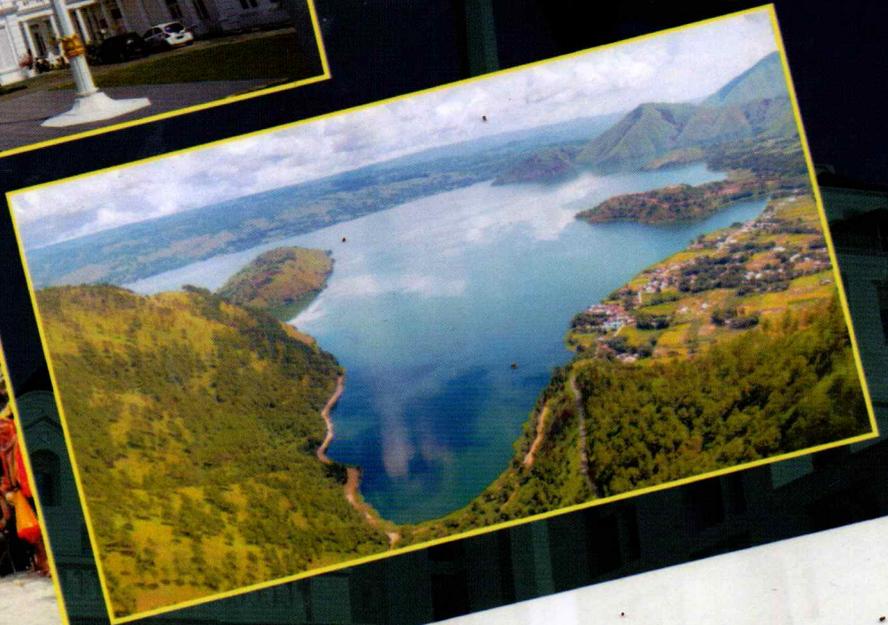
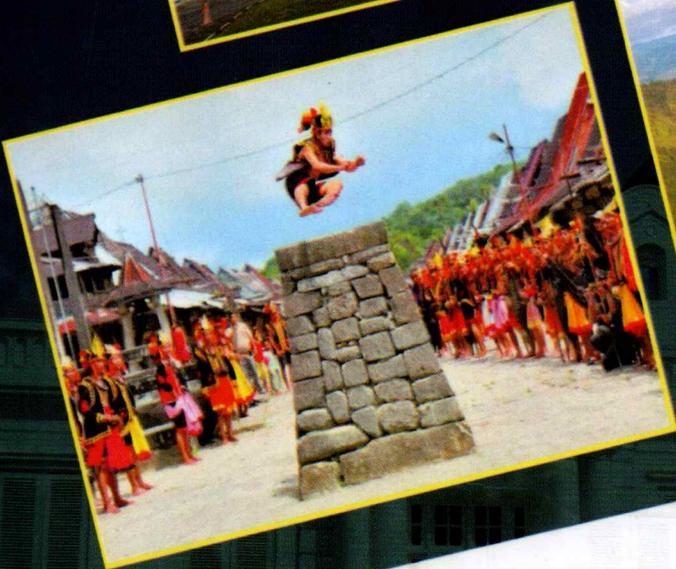




SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



RENCANA KERJA **SEKRETARIAT DAERAH** **PROVINSI SUMATERA UTARA** **TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan dokumen Renja Tahun 2022 ini berpedoman pada Pasal 361 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja ini merupakan kompilasi dari dokumen Renja Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi di Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian diharapkan melaksanakan program dan kegiatan antar Biro tidak tumpang tindih dan bisa saling bersinergi dalam mendukung pencapaian visi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Demikian dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini disusun untuk dapat dipedomani dan panduan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2022



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196411271990031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra Perangkat Daerah	5
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	5
B. Biro Kesejahteraan Rakyat	6
C. Biro Hukum	10
D. Biro Perekonomian	14
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	44
F. Biro Administrasi Pembangunan.....	46
G. Biro Organisasi	62
H. Biro Umum	64
I. Biro Administrasi Pimpinan	70
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	72
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	72
B. Biro Kesejahteraan Rakyat	72
C. Biro Hukum	74
D. Biro Perekonomian.....	77
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	81
F. Biro Administrasi Pembangunan.....	88
G. Biro Organisasi	97
H. Biro Umum.....	105
I. Biro Administrasi Pimpinan	106

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	108
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	108
B. Biro Kesejahteraan Rakyat	110
C. Biro Hukum	111
D. Biro Perekonomian	115
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	116
F. Biro Administrasi Pembangunan.....	117
G. Biro Organisasi	118
H. Biro Umum.....	119
I. Biro Administrasi Pimpinan	120
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	121
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	121
B. Biro Kesejahteraan Rakyat	130
C. Biro Hukum	130
D. Biro Perekonomian	136
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	138
F. Biro Administrasi Pembangunan.....	149
G. Biro Organisasi	154
H. Biro Umum.....	158
I. Biro Administrasi Pimpinan	159
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	165
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	165
B. Biro Kesejahteraan Rakyat	166
C. Biro Hukum	166
D. Biro Perekonomian	166
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	167
F. Biro Administrasi Pembangunan.....	167
G. Biro Organisasi	168
H. Biro Umum.....	168
I. Biro Administrasi Pimpinan	169
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	170
3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional	170
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	170
B. Biro Kesejahteraan Rakyat.....	171

C. Biro Hukum.....	172
D. Biro Perekonomian.....	174
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	175
F. Biro Administrasi Pembangunan	177
G. Biro Organisasi.....	179
H. Biro Umum.....	180
I. Biro Administrasi Pimpinan.....	182
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	183
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	183
B. Biro Kesejahteraan Rakyat.....	184
C. Biro Hukum.....	185
D. Biro Perekonomian.....	187
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	187
F. Biro Administrasi Pembangunan	189
G. Biro Organisasi.....	191
H. Biro Umum.....	191
I. Biro Administrasi Pimpinan.....	191
3.3. Program dan Kegiatan.....	193
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	193
B. Biro Kesejahteraan Rakyat.....	200
C. Biro Hukum.....	201
D. Biro Perekonomian.....	207
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	211
F. Biro Administrasi Pembangunan	211
G. Biro Organisasi.....	213
H. Biro Umum.....	214
I. Biro Administrasi Pimpinan.....	215
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	221
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	221
B. Biro Kesejahteraan Rakyat.....	222
C. Biro Hukum.....	224
D. Biro Perekonomian.....	225
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	226
F. Biro Administrasi Pembangunan	228

G. Biro Organisasi.....	229
H. Biro Umum.....	231
I. Biro Administrasi Pimpinan.....	232
BAB V PENUTUP	234

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2021	7
Tabel 2	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menurut Jenisnya di Sumatera Utara sd. Semester I (s.d bulan Juni) Tahun 2020	21
Tabel 3	Perkembangan Inflasi 5 Kota IHK di Sumatera Utara dan Nasional (Persen) Tahun 2020.....	23
Tabel 4	Harga bulan Desember Kota Padangsidempuan (dalam ribuan rupiah)	25
Tabel 5	Harga bulan Desember Kota Sibolga (dalam ribuan rupiah).....	27
Tabel 6	Harga bulan Desember Kota Medan (dalam ribuan rupiah).....	29
Tabel 7	Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tahun 2020	33
Tabel 8	Informasi Permodalan PT. Bank Sumut	42
Tabel 9	(Tabel 3.1. Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	48
Tabel 10	Pencapaian Kinerja Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2020 Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	63
Tabel 11	Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan yang Tercantum pada RKPD Biro Umum Tahun Anggaran 2020	65
Tabel 12	Realisasi Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu	70
Tabel 13	Indikator, target dan realisasi Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu.....	74
Tabel 14	(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2020 Biro Hukum Setdaprovsu.....	76
Tabel 15	Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan pendidikan/ fungsional jabatannya	79
Tabel 16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setdaprovsu.....	80
Tabel 17	Perubahan Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Setdaprovsu	80
Tabel 18	Hasil kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu	82
Tabel 19	Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2021.....	87
Tabel 20	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu Tahun 2019	89

Tabel 21	Rencana Kerja Anggaran Perubahan menurut Program Kerja dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	90
Tabel 22	Rincian Anggaran Refocusing dan P.APBD OPD Biro Kesejahteraan Rakyat.....	91
Tabel 23	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Provsu	96
Tabel 24	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditenderkan Tahun 2020	96
Tabel 25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada 26 Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	101
Tabel 26	Nilai Rata-rata (NRR), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Unsur Pelayanan pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	104
Tabel 27	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu..	107
Tabel 28	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	108
Tabel 29	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu.....	123
Tabel 30	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara Biro Hukum Setdaprovsu.....	132
Tabel 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara Biro Perekonomian Setdaprovsu	135
Tabel 32	Rancangan Awal Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu.....	140
Tabel 33	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	150
Tabel 34	Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	155
Tabel 35	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Biro Administrasi Pimpinan setdaprovsu.....	160
Tabel 36	Strategi dan Arah Kebijakan Biro Perekonomian Setdaprovsu.....	187
Tabel 37	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu	195
Tabel 38	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara	202

Tabel 39	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun Anggaran 2022.....	208
Tabel 40	Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu ..	212
Tabel 41	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	217
Tabel 42	Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu	224
Tabel 43	Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu	225
Tabel 44	Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu ..	228
Tabel 45	Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu	229
Tabel 46	Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu	232

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) berusaha untuk melakukan percepatan dalam penataan organisasi, penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia yang disusun kedalam sebuah Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 yang diselaraskan dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Sesuai ketentuan dengan mekanisme penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Menyatakan Bahwa, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, dan Perubahan RKPD (PRKPD) serta menjadi landasan dalam penyusunan KUPA dan perubahan PPAS untuk penyusunan perubahan APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka penting bagi Sekretariat Daerah merumuskan rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyusunan Renja ini seharusnya berdasarkan evaluasi kerja tahun-tahun sebelumnya yang merupakan bagian dari sebuah Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengalihan Tugas Kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 kedalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh, penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Memberikan pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan

pemerintahan untuk mencapai optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- d. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di Biro di lingkungan SetdaprovSU yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya merupakan 2 (dua) biro yang berdiri sendiri di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Pemerintahan dan Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama, maka sejak Januari 2021 dibentuk dan dikukuhkan para Pejabat di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan demikian resmi melebur 2 (dua) biro menjadi satu Biro yang disebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Tahun Anggaran 2020 telah disusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 yang menjadi pedoman pelaksanaan Program kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan serta 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran . 8.049.999.683. (delapan milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program ini di uraikan kedalam 5 (lima) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan logistik kantor.
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat

- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan:
 - a. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:
 - 1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - a. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
 - b. Fasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - c. Fasilitasi Penataan wilayah
 - 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - a. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - b. Pengembangan dan Penataan Urusan
 - c. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 3. Fasilitasi Kerjasama
 - a. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - b. Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/swasta
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Faktor-kator yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 antara lain di pengaruhi oleh:

- a. Penggabungan 2 (dua) biro menjadi satu biro.
- b. Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran TA 2021.
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d. Pandemi covid 19 sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 yang belum menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu selama tahun 2022 dan perkiraan target pada tahun 2023.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 1

Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
II.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
		FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

		FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR
		Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
		Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dari hasil evaluasi Renja Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU Tahun 2021 masih banyak yang harus diperbaiki, antara lain:

1. Secara umum program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 dapat dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan baik. Dari 2 program terlaksana dengan capaian kinerja kategori baik. Dari 2 program tersebut, hampir semua program tercapai realisasinya berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah turut berkontribusi dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yang diukur keberhasilannya menggunakan 2 (dua) indikator dan ditunjang dengan program/kegiatan. Adapun capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara kumulatif adalah sebesar 90.36%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikategorikan tercapai.
3. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi biro-biro oleh aparatur, kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, serta masih kurang benarnya perumusan indikator kinerja. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana untuk mendukung kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan.

4. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Sekretariat Daerah Provinsi sehingga tidak hanya tidak menjadi rutinitas formal semata, namun dapat diberikan timbal balik yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dimasa sekarang dan yang akan datang.
5. Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki ASN sebanyak 46 orang.

B.1. Realisasi Program/Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2021

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu merupakan langkah pemenuhan proses organisasi yang disusun setelah menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran. Pada tahun 2021, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu memiliki 2 (dua) program dengan 12 kegiatan yang didalamnya dengan persentase penyerapan dana sebesar 90.36% yaitu sebesar Rp.423.480.174.791,- dari pagu anggaran setelah P.APBD sebesar Rp.92.002.174.798,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.40.873.106.490,00,- adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2021 yaitu;

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan pendukung pelaksanaan seluruh program lainnya yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang merupakan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran baik sarana maupun prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran, dengan dana terealisasi sebesar Rp. 2.463.620.397,- atau 75 %. kegiatan yang ada di dalam program ini

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
2. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
3. Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi

2. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

Biro Kesejahteraan Setdaprovsu melaksanakan 1 (dua) kegiatan dalam program ini dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur ketika menghadapi perubahan dan tantangan dalam melaksanakan tugas, demi mewujudkan visi dan misi. Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu dana sebesar Rp. 84.710.000,- atau 84.45% Kegiatan di dalam program ini:

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

II. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang merupakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana Spiritual, Kelembagaan, pendidikan, social, kesehatan, dan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan Pariwisata serta Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu. Program ini yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada sumber daya manusia agar lebih meningkatkan pemahaman tentang keagamaan dan memahami tentang verifikasi dan supervisi bantuan sosial keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang terealisasi sebesar Rp. 324.837.448.423,- atau 63 %. bantuan social hibah pendidikan sebesar; Rp. 94.060.265.500,- atau 91.14%.

C. Biro Hukum

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Adapun penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2022 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Biro Hukum Setdaprovsu menurut DPPA Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.785.493.213,- Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 6 Program dan 20 Kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2019 yang diterima Biro Hukum Setdaprovsu menurut DPA Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.412.453.300,- yang terdiri dari 7 Program dan 27 Kegiatan.

C.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Renja Tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target 100 Surat terealisasi sebanyak 25 Surat atau 24,59%. Kegiatan ini berupa pengiriman surat menyurat Biro Hukum Setdaprovsu baik dalam kota maupun luar kota melalui kantor pos.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan target 15 Unit terealisasi sebanyak 12 Unit atau 74,47%. Kegiatan ini berupa perbaikan alat-alat kantor Biro Hukum Setdaprovsu seperti komputer, printer, laptop dan AC.

3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target 100 Orang terealisasi sebanyak 45 Orang atau 45,43%. Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat yang dilaksanakan di Biro Hukum Setdaprovsu.
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target 46 Jenis terealisasi sebanyak 40 Jenis atau sebesar 87,74%. Kegiatan ini berupa penyediaan bahan pakai habis berupa alat-alat tulis kantor Biro Hukum Setdaprovsu.
5. Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan target 18 Draft Ranperda terealisasi sebanyak 9 Draft Ranperda yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau sebesar 26%.
6. Kegiatan Bimtek Paralegal KDRT, dengan target 70 Orang terealisasi sebanyak 68 Orang yang atau sebesar 90,55%. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan aparatur paralegal KDRT Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Berbasis HAM, dengan target 70 Orang terealisasi sebanyak 60 Orang yang atau sebesar 89,79%. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota penyusun program dan kegiatan.

Terkait dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan yakni tahun 2020 ada 13 kegiatan (Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan,Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Provsu, Evaluasi Ranperda dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota, Revisi Terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara, Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Ranperda dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Panitia Pelaksana Ranham Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Bagi Aparatur di Lingkungan Pemprovsu, Penanganan Perkara Oleh Pemprovsu, Praktisi dan Akademisi, Studi Banding ke Biro Hukum Provinsi Lain Di Indonesia terkait dengan Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Hukum, Kelompok Kerja Hukum *Legal Drafting* yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

C.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum Setdaprovsu dengan OPD lain.
4. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
7. Masih kurangnya aparatur dalam melaksanakan penanganan perkara di lingkungan Pemprovsu.
8. Kurang memadainya sarana dan prasarana kantor sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
10. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik Kabupaten/Kota.

C.3. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra OPD

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra OPD adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program OPD, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program OPD itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu, antara lain:

1. Bahwa draft ranperda yang masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provsu belum semuanya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada Pembangunan di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Masih minimnya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya berdampak kepada tugas dan fungsi Gubernur sebagai Pembina dan Pengawas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap pelaporan ke Pemerintah Pusat.
3. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
5. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.

C.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Kerjasama dengan pihak OPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

D. Biro Perekonomian

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Biro Perekonomian SetdaprovSU telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. **2.309.480.452,-** dan serapan keuangan sebesar Rp. **2.060.652.350,-** atau 89,23%, dan untuk Tahun 2021 akan disajikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2020 antara Kepala Biro Perekonomian SetdaprovSU dengan Gubernur Sumatera Utara, telah ditetapkan Prioritas Program yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Program Pemberdayaan BUMD dengan Sasaran Strategis berupa **Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah dan Meningkatkan fungsi pemberdayaan terhadap BUMD**. Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2020 terdiri dari:

1. Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah.
2. Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD.

Guna mencapai Indikator Kinerja tersebut Biro Perekonomian SetdaprovSU bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, Lembaga-lembaga lain, BUMD terkait dan OPD ProvSU terkait.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Biro Perekonomian dari pelaksanaan kegiatan penunjang indikator kinerja utama tersebut antara lain :

1. Indikator Kinerja Utama yang pertama : Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah.

Adapun realisasi IKU Jumlah dokumen yang dihasilkan terkait ekonomi daerah antara lain:

- 1) Surat Edaran ke Bupati/Wali Kota se- Sumatera Utara dan GM. PT. Pertamina MOR I Medan Nomor 542/8892/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penertiban Penyaluran LPG 3 kg Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Surat ke Bupati/ Wali Kota Nomor 542/7897/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Permintaan Usulan Kuota LPG Tabung 3 kg Tahun 2021. Surat ini diterbitkan dalam rangka evaluasi penetapan kuota LPG tabung 3 kg per kabupaten/kota Tahun 2021.
- 3) Surat ke Bupati/Wali Kota Nomor 542/7823 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pemetaan Keberadaan Agen dan Pangkalan LPG tabung 3 Kg bersubsidi di Provinsi.
- 4) Surat Himbauan untuk Berbelanja Bijak kepada Bupati/Wali Kota Nomor 511.1/3051 tanggal 31 Maret 2020. Himbauan ini disampaikan dalam mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran Covid-19 dan menghindari kelangkaan bahan kebutuhan pokok.
- 5) Surat Edaran kepada Bupati/Wali Kota Nomor 511.1/3073 tanggal 1 April 2020 perihal Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Menjelang HKBN Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H yang bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak panik dan tidak berbelanja berlebihan akibat adanya pandemi covid-19.
- 6) Surat Edaran Penyampaian Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Laju Inflasi Tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 500/9404 tanggal 11 Desember 2020 yang bertujuan agar Bupati/Wali Kota memperkuat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mempercepat Realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal guna mendukung pemulihan ekonomi terutama di sektor UMKM.
- 7) Surat kepada Bupati/Wali Kota Nomor 542/7823 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pemetaan Keberadaan Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 kg bersubsidi di Provsu. Surat ini bertujuan untuk menertibkan pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi agar dapat berjalan dengan tepat sasaran dan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan serta dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan LPG tabung 3 kg bersubsidi sehingga perlu dilakukan pemetaan keberadaan agen dan pangkalan tabung LPG 3 kg.
- 8) Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 580/2004/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Gerakan Sumatera Utara Menabung melalui Program Simpanan Pelajar. Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Perpres RI Nomor 82 Tahun 2016 maka Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Utara dan mendorong budaya menabung peserta didik sejak dini sehingga terwujud kepemilikan rekening oleh seluruh peserta didik di Sumatera Utara (*One Student One Account*).

- 9) Laporan Monitoring terkait pendataan produk garam yang beredar di pasar. Adapun hasil yang didapat adalah terdatanya produk garam yang beredar di Pasar, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pengawasan Pengadaan Dan Peredaran Garam di Provinsi Sumatera Utara. Data Jumlah merek garam yang beredar sesuai aturan adalah bahwa sejumlah 42,8 % produksi garam yang beredar sudah sesuai dengan Perda tersebut dan 57,2 % yang belum sesuai sepenuhnya.
- 10) Laporan terkait pelaksanaan program kemitraan Pertamina untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

A. Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Sumatera Utara.

Biro Perekonomian SetdaprovSU melakukan monitoring ke kabupaten/kota dan menemukan hasil bahwa semua kabupaten belum membentuk Komite Nasional Garam (KNG) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/SK/ 5/1995 tanggal 4 Mei 1995 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam (KNG) tingkat daerah (Kabupaten/Kota).

Biro Perekonomian SetdaprovSU juga melakukan monitoring tentang kewajiban distributor untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Provinsi Sumatera Utara bahwa garam beryodium yang dapat diedarkan wajib mencantumkan ketentuan label sebagai berikut:

- a. Nama Makanan “Garam Beryodium”;
- b. Nama / Merk Dagang;
- c. Kandungan Kalium Yodat minimal 30 ppm (part per milion/sepersejuta);
- d. Berat bersih yang dinyatakan dalam Sistem Metrik sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Kode Produksi;
- f. Nomor Pendaftaran dari Instansi yang berwenang;

- g. Nama dan Alamat Perusahaan;
- h. Komposisi Garam yang dikemas;
- i. Tanda / Logo SNI

Didapat juga data produk garam yang beredar di pasar, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Provinsi Sumatera Utara. Data Jumlah merek garam yang beredar sesuai aturan adalah bahwa sejumlah 42,8 % produksi garam yang beredar sudah sesuai dengan Perda tersebut dan 57,2 % yang belum sesuai sepenuhnya.

B. Integrasi dan Sinergitas Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provsu.

Telah terbentuknya TPAKD di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Adanya akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Peran serta Lembaga Jasa Keuangan dapat lebih meningkat dalam pembangunan ekonomi daerah.

Terpilihnya TPAKD Provsu dan TPAKD Kab.Langkat sebagai penerima TPAKD Award Tahun 2020 kategori Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penyediaan akses keuangan terbaik.

C. Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Bidang Perikanan dan Peternakan di Sumatera Utara.

Biro Perekonomian Setdaprovsu telah melakukan koordinasi terkait Integrasi dan Sinergitas mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan bidang perikanan dan peternakan di Sumatera Utara ke Kabupaten Langkat dan D. Serdang, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo dan Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai.

Sesuai hasil koordinasi diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung dilakukannya integrasi dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan dan peternak.

Adapun kesimpulan yang didapat pada pertemuan tersebut adalah:

1. Sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan Universitas Sumatera Utara, disimpulkan bahwa berbagai Keuntungan

Bagi masyarakat dalam kegiatan Integrasi kebun sawit - sapi, antara lain:

- a. Integrasi kebun sawit-sapi mendorong peningkatan populasi ternak sapi dan ketahanan pangan di Sumatera Utara.
 - b. Hasil samping industri dan kebun kelapa sawit berpotensi besar sebagai bahan pakan ternak sapi.
 - c. Integrasi kebun sawit dengan sapi dapat mensejahterakan karyawan dan masyarakat disekitar kebun. Keuntungan Bagi Pihak Perkebunan, antara lain: Keamanan kebun sawit dapat terjaga berkat hubungan yang baik, Pemanfaatan hasil samping kebun dan pengolahan kelapa sawit berpeluang sebagai unit usaha antara masyarakat dan pihak manajemen perkebunan
2. Dalam Program integrasi Sawit-Sapi, ditemukan berbagai persoalan/permasalahan di lapangan, antara lain:
- a. Lambatnya perubahan sikap dari beternak extensif menjadi intensif.
 - b. Kurangnya pengetahuan sumber daya petani peternak.
 - c. Kurangnya modal usaha untuk penggemukan.
 - d. Penegakan hukum (KUHP 549) belum berjalan secara efektif
 - e. Diperlukan suatu PERDA tentang Integrasi Kebun Sawit dengan Ternak Sapi untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan mewujudkan/mensejahterakan rakyat sekitar kebun dan menguntungkan berbagai pihak serta menjadikan Sumatera Utara sebagai lumbung ternak sapi.

Untuk itu koordinasi antara Perusahaan Perkebunan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat harus semakin ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan produksi peternakan, PT. Juang Jaya Abdi Alam merekomendasikan Konsep 3 S (Sawit, Sapi, Singkong). Ini adalah konsep baru dari integrasi pemeliharaan sapi yang paling mungkin bisa dilakukan di Indonesia. Ide ini harus didukung oleh Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, perkebunan, perbankan, permodalan, feedlotter dan semua pihak yang terlibat dalam usaha ini. Konsep ini juga dapat menyerap banyak tenaga kerja karena bisa menciptakan lapangan kerja baru yang diharapkan bisa mengurangi pengangguran.

D. Koordinasi dan Sinergitas dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provsu.

Pada Tahun 2020 Biro Perekonomian SetdaprovSU melaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Sinergitas terkait Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Oktober 2020 di Grand Kanaya Hotel Medan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota dan Kepala Bagian Perekonomian atau Bagian Sumber Daya Alam yang membidangi pupuk bersubsidi serta stakeholder terkait.

Dalam pertemuan ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengatasi hal keberadaan pupuk yang tidak tepat waktu (lewat pada masa yang dibutuhkan), diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan komunikasi yang intens dengan Kios Pupuk di daerah terkait dengan musim tanam di daerah untuk mengatasi keberadaan pupuk yang tidak tepat waktu.
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI untuk Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Utara.
3. Perlu adanya koordinasi sebelum pengusulan kuota dari Kabupaten/Kota antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu dengan ATR BPN terkait dengan luas baku lahan sesuai kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis pupuk agar alokasi pupuk tidak berkurang kedepan dan disesuaikan dengan jadwal tanam petani di Kabupaten/Kota.
4. Perlu peran aktif KP3 Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan pendistribusian pupuk ke petani dan stok pupuk di distributor dan kios pengecer.

Terkait dengan penyaluran dan pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida, Biro Bina Perekonomian SetdaprovSU telah melaksanakan monitoring ke kab/kota ke 15 Kab/kota antara lain: Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu, Kota Tanjung Balai, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kag. Humbang Hasundutan, Kab. Toba, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota. P. Siantar dan Kab. Simalungun.

Sampai dengan bulan Juni, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menurut jenisnya di Sumatera Utara
sd. Semester I (s.d bulan Juni) Tahun 2020.

<i>Jenis Pupuk</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Alokasi Kebutuhan Menurut Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor : 521.3/62.12/SAPRA, s/d Juni 2020</i>	<i>% Realisasi</i>
UREA	76,374.70	57,221.00	133.47
SP-36	15,136.80	12,397.00	122.10
ZA	17,643.95	15,101.00	116.84
NPK	60,021.80	46,993.00	127.72
ORGANIK	4,830.12	7,416.86	65.12

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang ditemui selama melaksanakan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida antara lain:

1. Beberapa Kab/Kota masih dalam tahap proses pembuatan Kartu Tani, namun para Kelompok Tani telah menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi yang sudah sesuai dengan E-RDKK yang berlaku dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
2. Pada saat penyaluran pupuk, sering tidak tepat dengan waktu jadwal tanam.
3. Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan tidak mencukupi kebutuhan petani.
4. Keberadaan beberapa kios penyedia pupuk bersubsidi yang jauh dari domisili anggota kelompok tani.

Untuk mengatasi hal tersebut solusi yang dapat dilakukan ialah:

1. Diupayakan pencetakan kartu tani melalui Dinas Pertanian dan Bank BNI lebih cepat kepada petani, mengadakan sosialisasi kepada kelompok tani mengenai pentingnya penggunaan kartu tani sehingga petani dalam penebusan pupuk dapat mempergunakan kartutani ini.
2. Melakukan pembinaan terhadap kios pengecer dan distributor untuk lebih menyesuaikan jadwal turunnya pupuk dengan jadwal pemupukan agar hal ini kedepannya tidak terjadi lagi.

3. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar melakukan koordinasi dengan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di lapangan, agar tepat pendistribusiannya.
4. Mengusulkan penambahan alokasi ke provinsi dari pusat, selain itu dapat juga dengan menyediakan pupuk non subsidi untuk memenuhi pupuk subsidi yang kurang (swadaya).
5. Alokasi pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan usulan kebutuhan kelompok tani dan tren penyerapan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan petani dapat dipenuhi.
6. Agar alokasi pupuk bersubsidi kedepannya dapat disesuaikan atau setidaknya mendekati luas baku lahan yang ada.
7. Agar seluruh anggota KP3 bekerja sesuai tupoksi dan rapat koordinasi perlu ditingkatkan pelaksanaannya.

E. Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi TPID di Provsu.

Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi TPID di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan secara rutin dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Provinsi maupun Rapat Koordinasi Kabupate/Kota agar Inflasi Tahun 2020 dapat terkendali. Selain itu melaksanakan Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provsu dan TPID se-Provinsi Sumatera Utara, dari pertemuan tersebut disepakati untuk menentukan rencana menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di Sumatera Utara yang dituangkan dalam Road Map masing-masing TPID.

Sepanjang Tahun 2020 terjadi inflasi sebesar 1.96 persen (yoy), hal ini mempengaruhi Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi pada Triwulan IV2020 turun sebesar 21,07 persen (q-to-q) dan turun sebesar 53,42 persen (y-on-y).

Kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun terutama pada sektor transportasi, rekreasi dan budaya, serta penginapan dan hotel yang turun tajam ketiga sektor tersebut naik cukup signifikan serta beberapa sektor pengeluaran naik sehingga terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran lembaga non-profit yang melayani rumah tangga turun terutama pada organisasi sosial. Namun, meningkat karena adanya Pilkada, Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pengeluaran pemerintah juga naik karena adanya bantuan sosial

penanganan Covid-19 dan bantuan bencana banjir di beberapa daerah Sumatera Utara. Ekspor dan impor selama tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 karena masih adanya dampak pandemi Covid-19. Kelompok komoditas ekspor yang turun yaitu industri minuman. Sedangkan impor yang turun yaitu industri minuman, peternakan, dan barang modal.

Berikut tabel Perkembangan Inflasi 5 Kota IHK di Sumatera Utara dan Nasional (Persen) tahun 2020.

Tabel 3
Perkembangan Inflasi 5 Kota IHK di Sumatera Utara dan Nasional (Persen) Tahun 2020

<i>Wilayah Inflasi</i>	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Mei</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Agst</i>	<i>Sept</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Des</i>	<i>Tahunan</i>
Sumatera Utara	0,57	0,13	-0,16	-0,29	0,43	-0,07	-0,25	0,06	-0,01	0,47	0,33	0,75	1,96
Sibolga	0,20	0,69	-0,79	-0,66	0,17	0,13	-0,31	-0,01	0,29	1,04	0,34	1,32	2,42
Pematangsiantar	0,62	0,12	-0,12	-0,40	0,37	-0,13	-0,76	0,20	0,29	0,46	0,64	1,47	2,78
Medan	0,58	0,14	-0,19	-0,28	0,42	-0,09	-0,21	0,04	-0,05	0,45	0,30	0,65	1,76
Padangsidempuan	0,32	-0,01	0,53	0,04	0,76	-0,02	-0,25	0,07	0,29	0,46	0,64	1,00	3,27
Gunungsitoli	1,31	-0,73	0,43	-0,71	0,37	0,22	-0,01	0,61	1,00	0,71	0,15	1,87	5,32
Indonesia	0,39	0,28	0,10	0,08	0,07	0,18	-0,10	-0,05	-0,05	0,07	0,28	0,45	1,68

F. Monitoring dan Evaluasi Harga Bahan Pokok/Bahan Penting Lainnya serta Pemantauan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Monitoring dan evaluasi harga bahan pokok/bahan penting lainnya serta pemantauan pemberdayaan pasar tradisional di evaluasi dan dipantau setiap hari oleh tim monitoring dan evaluasi harga bahan pokok/bahan penting lainnya yang ada di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk kemudian ditembuskan ke Biro Perekonomian SetdaprovSU melalui Kasubbag Pengendalian Inflasi Daerah.

Monitoring dilakukan di beberapa pasar tradisional untuk memantau stok pangan maupun harga pangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Informasi yang didapat di lapangan merupakan data yang sangat penting yang akan diolah dan dikirimkan ke pusat sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional melalui website siharapanku.

Kegiatan monitoring dan evaluasi stok serta harga pangan baik ditingkat produsen, grosir, maupun eceran selalu dipersiapkan untuk mengantisipasi pergerakan harga, apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik disebabkan gangguan pasokan maupun distribusi bahan pangan.

Dari data yang didapat dari Perum Bulog Sumut Tahun 2020, stok minyak goreng Sumut mencapai 40.140 liter, terigu sebanyak 1,84 ton, gula kristal putih sebanyak 99,88 ton, daging sebanyak 11,65 ton dan beras 10.802 ton. Stok daging sapi beku juga cukup aman atau 11,60 ton. Stok akan terus diperkuat sambil meningkatkan pemasaran agar ketersediaan di pasar memadai. Ketersediaan yang memadai diharapkan juga menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar. Karena Masyarakat harus dilindungi dan pemerintah juga berupaya menjaga inflasi.

Sementara itu harga kebutuhan pokok di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) relatif stabil menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hanya ada beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan harga. Harga cabai merah sekitar Rp. 55.000,- sampai Rp.56.000,-/kg, daging ayam sekitar Rp. 31.000,-/kg (bulat) dan Rp 36.000,- sampai Rp.37.000/kg (bersih). Sementara bawang merah Rp.30.000,- sampai Rp.32.000,-/kg, bawang putih Rp. 22.000,- sampai Rp. 24.000,-/kg, daging sapi (has dalam) Rp. 130.000,-/kg, telur ayam Rp.1.700,-/butir, minyak goreng kuning curah sekitar Rp.12.500/liter.

Mengenai penurunan pembeli di pasar, hal itu diakibatkan pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemprov Sumut sedang berupaya memulihkannya, antara lain dengan mempercepat penyerapan APBD.

Berikut Tabel Perbandingan Harga Bahan Pokok/Bahan Penting lainnya di 3 kota IHK Sumatera Utara:

Tabel 4
Harga bulan Desember Kota Padangsidimpuan (dalam ribuan rupiah)

Komoditi	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	28	29	30
Tepung Terigu Segitiga Biru	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Tepung Terigu Kunci	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.33	10.25	10.75	10	10.25	10.25	10.25	10.25	10	10.25	10.25	10.25
Tepung Terigu Cakra Kembar	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.33	12.25	12.5	12	12.25	12.25	12.25	12.25	12	12.25	12.25	12.25
Telur Ayam Kampung	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	46.58	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5
Telur Ayam Broiler	24	24	24	24	24	24	27.2	27.2	27.2	32	32	39.1	28.8	28.8	28.8	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
Susu Kental Manis Merk Indomilk	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Susu Kental Manis Merk Bendera	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Susu Bubuk Merk Indomilk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Susu Bubuk Merk Dancow	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Minyak Goreng Kemasan Bimoli	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15	15.25	15	15	15	15	15
Minyak Goreng Curah Kuning	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	11.95	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
Ketela Pohon	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.333	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Kacang Tanah	24.75	24.75	24.75	19.13	25	24.75	24.75	24.75	24.67	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
Kacang Kedelai Lokal	6.5	6.5	6.5	6.5	4.5	6.5	6.5	6.5	8.667	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	24.75	6.5	6.5	4.5
Kacang Kedelai Eks Impor	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kacang Hijau	21.75	21.75	21.75	21.75	22.25	21.75	21.75	21.75	21.67	21.75	21.75	21.75	21.75	21.75	21.75	21.75	21.25	21.75	21.75	21.75
Jagung Pipilan Kering	6.25	6.25	6.25	6.25	6.5	6.25	6.25	6.25	6	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
Indomie Kari Ayam	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	7.375	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Ikan Teri Peto	96.25	96.25	96.25	96.25	98.75	96.25	96.25	96.25	95	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25
Ikan Kembung	44.25	44.25	44.25	44.25	45	44.25	44.25	44.25	44	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25
Gula Pasir	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Garam Beriodium Halus	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	19.5	12	12	12	12
Garam Beriodium Bata (250g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daging Sapi Murni	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.3	128.8	128.8	97.5	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8	128.8
Daging Ayam Kampung	68.75	70	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	66.67	68.75	68.75	60.25	68.75	68.75	68.75	68.75	53	68.75	68.75	68.75
Daging Ayam Broiler	35	36	36	36	35.5	35	35	35	35	34.75	34.75	57	34.75	34.75	37	37.5	37.5	39.5	38.5	38.5
Cabe Rawit Merah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabe Rawit Hijau	41.75	37.75	45.75	49.5	45	46.25	50.5	50.5	51	53.75	53.75	55	55	55	55	53.5	53.5	68.25	68.25	68.25
Cabe Merah Keriting	47	47.25	47.25	47.25	43.5	42.25	41.5	41.5	41.33	42.75	42.75	45.38	42.75	42.75	42.75	49.5	49	73.75	78.25	73.75
Cabe Merah Biasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Beras Kuku Balam	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.83	11.81	11.75	11.81	11.75	11.75	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81
Beras Jongkong Ir 64	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bawang Putih	27.5	28.5	28.5	28.5	29.5	29	28.5	28	28.67	29	29	29	29	29	29	29	28.5	28.5	29	29
Bawang Merah Lokal	33.5	33.25	33.25	33.25	34	33.25	30.5	30	30.67	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	31	32.25	32.25	35.25	34.5	34.5
Bawang Merah Import	0	0	0	0	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 5
Harga bulan Desember Kota Sibolga (dalam ribuan rupiah)

Komoditi	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	28	29	30
Tepung Terigu Segitiga Biru	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tepung Terigu Kunci	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Tepung Terigu Cakra Kembar	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Telur Ayam Kampung	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
Telur Ayam Broiler	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	28	28	28	28	28	28
Susu Kental Manis Merk Indomilk	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Susu Kental Manis Merk Bendera	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Susu Bubuk Merk Indomilk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Susu Bubuk Merk Dancow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minyak Goreng Kemasan Bimoli	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Minyak Goreng Curah Kuning	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ketela Pohon	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kacang Tanah	20	20	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	20	21.5	23	23	23	23	23
Kacang Kedelai Lokal	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Kacang Kedelai Eks Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kacang Hijau	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Jagung Pipilan Kering	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Indomie Kari Ayam	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Ikan Teri Peto	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ikan Kembung	40	40	40	40	40	220	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Gula Pasir	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Garam Periodium Halus	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Garam Periodium Bata (250g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daging Sapi Murni	140	140	140	140	140	140	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Daging Ayam Kampung	75	75	75	75	75	75	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Daging Ayam Broiler	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	32	32
Cabe Rawit Merah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabe Rawit Hijau	38	38	38	38	42	40	0	42	42	42	42	50	50	48	50	50	50	60	60	60
Cabe Merah Keriting	38	40	40	42	39	40	0	42	40	40	40	40	40	42	52	52	53	60	60	45
Cabe Merah Biasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beras Kuku Balam	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Beras Jongkong Ir 64	10	10	10	10	10	10	0	10	10	5.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bawang Putih	22	22	22	22	25	23.5	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Bawang Merah Lokal	28	28	28	28	35	31.5	0	35	35	35	35	30	30	30	32	32	32	35	35	35
Bawang Merah Import	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 6
Harga bulan Desember Kota Medan (dalam ribuan rupiah)

Komoditi	1	2	3	4	7	8	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	28	29	30
Tepung Terigu Segitiga Biru	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tepung Terigu Kunci	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Tepung Terigu Cakra Kembar	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Telur Ayam Kampung	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
Telur Ayam Broiler	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	28	28	28	28	28	28
Susu Kental Manis Merk Indomilk	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Susu Kental Manis Merk Bendera	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Susu Bubuk Merk Indomilk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Susu Bubuk Merk Dancow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minyak Goreng Kemasan Bimoli	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Minyak Goreng Curah Kuning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ketela Pohon	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kacang Tanah	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21.5	23	23	23	23	23
Kacang Kedelai Lokal	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Kacang Kedelai Eks Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kacang Hijau	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Jagung Pipilan Kering	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Indomie Kari Ayam	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Ikan Teri Peto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ikan Kembung	40	40	40	40	40	220	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Gula Pasir	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Garam Beriodium Halus	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Garam Beriodium Bata (250g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daging Sapi Murni	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Daging Ayam Kampung	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Daging Ayam Broiler	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	32	32	32
Cabe Rawit Merah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabe Rawit Hijau	38	38	38	38	42	40	42	42	42	42	50	50	48	50	50	50	60	60	60
Cabe Merah Keriting	38	40	40	42	39	40	42	40	40	40	40	40	42	52	52	53	60	60	45
Cabe Merah Biasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beras Kuku Balam	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Beras Jongkong Ir 64	10	10	10	10	10	10	10	10	5.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bawang Putih	22	22	22	22	25	23.5	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Bawang Merah Lokal	28	28	28	28	35	31.5	35	35	35	35	30	30	30	32	32	32	35	35	35
Bawang Merah Import	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

G. Monitoring dan Sinergitas dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyaluran LPG untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Sumatera Utara.

Akibat Pandemi Covid-19, koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara lebih banyak dilaksanakan secara online baik melalui telepon maupun melalui aplikasi WhatsApp, dengan pembuatan WhatsApp Group “Tim Koordinasi LPG SUMUT”.

Terlaksananya Rapat Koordinasi melalui aplikasi Zoom (*Video Conference*) untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi di masa pandemi Covid-19.
2. Realisasi Penyaluran LPG Tabung 3 Kg di Sumatera Utara s.d Bulan Juli 2020 serta ketersediaan LPG tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kinerja Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg serta pemberlakuan HET di lapangan.

Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang belum membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, agar segera membentuk dan Tim yang sudah terbentuk agar semakin meningkatkan pengawasan dan pembinaan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Daerah masing-masing.
2. PT. Pertamina MOR I Medan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias, untuk melaksanakan Sosialisasi Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kepulauan Nias.
3. Akan dilaksanakan pertemuan per zona untuk melihat langsung ke lapangan, persoalan/permasalahan terkait dengan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Sumatera Utara.
4. PT. Pertamina MOR I Medan agar menyampaikan laporan realisasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara ke Biro Perekonomian Setdaprovsu, paling lama tanggal 10 setiap bulannya.

5. PT. Pertamina MOR I Medan akan melakukan uji coba pengisian SPPBE di Kepulauan Nias.

Ikutsertanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Biro Perekonomian Setdaprovsu) pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Kebijakan LPG Tabung 3 Kg dan Pemaparan Usulan Kuota Tahun 2020 oleh Ditjen Migas untuk Provinsi : NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Hasil yang dicapai, bertempat di Hotel Swiss-Belhotel Bogor Jl. Salak No. 38 – 40, RT. 03/RW.04, Babakan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Realisasi LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 374.314 MT dari kuota sebesar 380.979 MT. untuk Tahun 2020 usulan Kuota yang akan diusulkan oleh Dirjen Migas sebesar 388.548 MT, naik sebesar 7.605 MT.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, ditetapkan bahwa Konsumen Pengguna Lpg 3 Kg adalah Rumah Tangga Miskin, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran.
3. Sampai saat ini subsidi LPG masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, jumlah Rumah Tangga Pengguna LPG di seluruh wilayah menurut tingkat kesejahteraan, 30% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG, sementara 86% dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu. Hal ini sesuai dengan data yang bersumber dari Susenas 2018 BPS, Diolah, TNP2K, 2019.
4. Diharapkan pelaksanaan pengawasan di daerah agar benar-benar dilaksanakan dengan baik agar penyaluran LPG Tabung 3 Kg sebagai barang strategis dapat tepat sasaran.
5. Besaran Kuota LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tahun 2020 sama dengan besar realisasi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2019 atau Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2019 dengan mengambil angka yang lebih besar.

Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Penyaluran LPG untuk Kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di

Sumatera Utara ke: Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Labuhan Batu.

Ditemui beberapa permasalahan terkait dengan penyaluran LPG tabung 3 kg di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Masih banyak Pangkalan yang tidak memasang Plank Merek yang seharusnya mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Plank Merek tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan harga bagi Masyarakat Miskin dan Usaha Mikro.
2. Ketepatan sasaran pemakaian LPG Tabung 3 Kg yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro belum berjalan dengan baik, karena masih banyak Rumah Makan Besar dan masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.
3. Keberadaan kios pengecer yang menjual bebas LPG Tabung 3 Kg sangat mempengaruhi HET LPG Tabung 3 Kg.
4. Kerjasama antara Agen dan Pangkalan dengan Pemerintah Daerah belum berjalan dengan baik, karena belum semua Agen dan Pangkalan di daerah yang menyampaikan Laporan Penyaluran ke Pemerintah Daerah.

Kuota dan realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg bersubsidi dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tahun 2020.

No	Kabupaten / Kota	Kuota 2020 (MT)	Realisasi 2020 (MT)	Persentase (%)
1	Kabupaten Asahan	20.080	21.783	108.48%
2	Kabupaten Batubara	13.304	13.413	100.82%
3	Kabupaten Dairi	7.214	7.461	103.42%
4	Kabupaten Deli Serdang	70.704	74.955	106.01%
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	3.328	3.802	114.24%
6	Kabupaten Karo	12.870	16.046	124.68%
7	Kabupaten Labuhan Batu	11.613	12.870	110.82%
8	Kabupaten Langkat	29.127	31.189	107.08%

9	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	6.443	6.782	105.26%
10	Kabupaten Labuhan Batu Utara	12.120	12.966	106.98%
11	Kabupaten Mandailing Natal	4.720	6.021	127.56%
12	Kabupaten Nias	2.555	815	31.90%
13	Kabupaten Nias Selatan	6.189	1.362	22.01%
14	Kabupaten Nias Utara	2.361	610	25.84%
15	Kabupaten Nias Barat	2.177	590	27.10%
16	Kabupaten Padang Lawas	3.033	3.864	127.40%
17	Kabupaten Pakpak Bharat	840	986	117.38%
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	2.747	3.232	117.66%
19	Kabupaten Samosir	2.849	2.940	103.19%
20	Kabupaten Serdang Bedagai	18.120	18.776	103.62%
21	Kabupaten Simalungun	22.031	25.139	114.11%
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	5.996	6.480	108.07%
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	4.608	5.862	127.21%
24	Kabupaten Tapanuli Utara	5.754	6.101	106.03%
25	Kabupaten Toba Samosir	5.497	5.955	108.33%
26	Kota Binjai	8.217	8.860	107.83%
27	Kota Medan	77.833	79.950	102.72%
28	Kota Pematang Siantar	8.971	9.400	104.78%
29	Kota Padangsidimpuan	3.143	3.300	105.00%
30	Kota Sibolga	2.425	2.522	104.00%
31	Kota Tebing Tinggi	4.593	5.132	111.74%
32	Kota Tanjung Balai	4.156	4.334	104.28%
33	Kota Gunung Sitoli	2.966	1.967	66.32%
Total		388.584	405.465	104.34%

H. Integrasi dan Sinergitas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pariwisata.

Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 yang kemudian berimbas kepada sektor lain. Ada banyak pelaku atau pegiat pariwisata mulai dari mereka yang bekerja di bidang penginapan, perhotelan, travel, pertunjukan, tour guide, serta sektor lain misalnya pelaku seni dan budaya seperti seni tari, pelukis, dan pemahat. Belum lagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk industri

souvenir dan kuliner yang akan mendapat bantuan modal dari BUMN untuk kelangsungan usaha di masa Pandemi covid-19.

Terlaksananya koordinasi terkait pariwisata ke Kabupaten/Kota di Sumatera Utara antara lain: Pemkab simalungun, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Samosir, Pemkab madina, Pemkab Karo, Pemkab langkat dan Pemkab Pakpak Bharat.

Program ini diarahkan sebagai upaya pengembangan potensi obyek wisata dengan memperhatikan adanya pembenahan, meningkatkan promosi pariwisata, dan menjalankan protokol kesehatan wabah covid-19 serta pemulihan UMKM yang terdampak pada para pelaku dan masyarakat. Untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat serta pencegahan penyebaran covid-19 di daerah pariwisata. Kegiatan ini juga sebagai sosialisasi program bantuan Modal untuk UMKM pariwisata yang terdampak covid-19 terkhusus pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba).

2. Indikator Kinerja Utama yang kedua : Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD.

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara.
3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Sumatera Utara.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/364/KPTS/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Panitia Seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/288/KPTS/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtana di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024.
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/420/KPTS/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019.
8. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/552/KPTS/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
10. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

A. Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Usaha BUMD Pemprov.

1. PT. Perkebunan Sumatera Utara.

Tidak terealisasinya pembayaran PAD Tahun 2020 dari target sebesar Rp. 5,953,200,000.

Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara yaitu:

- Tidak Keluarnya Penyertaan Modal 60 M di tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemegang Saham) yang sudah dianggarkan dalam RKA 2020 sehingga menyebabkan terhentinya program kerja PT.PSU di tahun 2020sehubungan hal tersebut diatas PT. Perkebunan Sumatera Utara tidak bisa memberikan PAD kepada Pemprov dan sesuai surat Bank Mandiri no CM1.MDN/SPPK/046/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Syarat Pemberian restruk KI dan KMK No 5 adalah Pembagian Deviden diperkenankan apabila telah terdapat Penyetoran Modal dari Pemegang Saham dihitung sejak penandatanganan addendum Perjanjian Kredit sebelum Pembagian deviden dilaksanakan dan total

deviden selama setahun yang dialokasikan maksimal 25% dari laba Bersih PT.PSU.

- Produksi CPO Menurun diakibatkan turunnya produksi TBS kelapa sawit sendiri dan PMKS sering rusak.
- Menurunnya Produksi TBS sendiri dikarenakan tanaman yang sudah tua dan meninggi dan harus segera di-*replanting* dan tanaman kelapa sawit banyak kena Ganoderma disamping itu juga jalan (infrastruktur) yang rusak.
- Pembelian TBS kelapa sawit kalah bersaing dari pihak swasta harga terlalu tinggi.
- Kelebihan tenaga sebanyak 212 orang sehingga membebani Perusahaan dalam 1 tahun Rp. 10,1 Milyar.

Upaya yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Sehubungan dengan Program kerja Tahun 2020 tidak berjalan dikarenakan tidak ada penyertaan modal dari Pemegang Saham (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) ditahun 2020, maka pengembangan *bisnis plan* kedepan yaitu mengalihkan program kerja tahun 2020 sebesar Rp. 80 M pada tahun 2021 sehingga PT. PSU bisa memberikan PAD pada Pemprovsu.
- Segera malakukan tanam ulang (*replanting*) dengan sistem *big hole* sehingga Produksi sawit, CPO diharapkan meningkat serta memperbaiki jalan (infrastruktur) kebun, melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit yang ada potensi produksinya.
- Peremajaan/perbaikan PMKS.
- Merasionalisasi tenaga kerja sebanyak 212 orang di tahun 2021 dengan cara rasionalisasi sebesar Rp.19,5 M dengan ini kita bisa menghemat Rp.10,1 M tiap tahunnya.

2. PT. Dhirga Surya Provsu.

Beberapa capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 antara lain:

- Pada tahun 2020 telah dilaksanakan penanda tanganan MOU dengan BUMDes pada 3 (tiga) kabupaten yaitu Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Langkat terkait dengan pembelian gabah petani.

- Persetujuan sebagai pengelola gudang dalam Sistem Resi Gudang. Nomor: 78/Bappebti/Kep-SRG/SP/07/2020 di Dusun I Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Persetujuan sebagai pengelola gudang dalam Sistem Resi Gudang. Nomor: 111/Bappebti/Kep-SRG/SP/PG/12/2020, di Namu Ukur Utara, Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang.
- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkab Langkat tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang.
- Adanya hasil Uji Mutu Resi Gudang sebagai Syarat Sistem Manajemen Mutu Pengelolaan Gudang Untuk Sistem Resi Gudang dengan hasil layak sebagai pengelola.
- Terlaksananya Pelatihan Calon Pengelola Resi Gudang.
- Mengajukan permohonan pengelolaan Mess dengan cara sewa ke Gubernur Sumatera Utara.
- Berkoordinasi dengan pemprovsu tentang mekanisme pengelolaan mess dengan sistem sewa.
- Melakukan penilaian Aset untuk menentukan harga sewa 5 mess pemprovsu dengan menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik.
- Terlaksana dan sekarang *Fix Income* PT. Dhirga Surya sejumlah Rp. 1.265.000.000.

Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh PT. Dhirga Surya yaitu:

- PT. Dhirga Surya Sumatera mengalami kerugian pada tahun 2020, sehingga tidak dapat menyetorkan PAD, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014.
- PT. Dhirga Surya Sumatera Utara belum memiliki unit bisnis yang dapat memberikan PAD.
- Penyediaan Beras Belum Dapat Dilaksanakan karena belum terbitnya Perda Perubahan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara yang saat ini masih berproses di Bapemperda dan belum diterimanya Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Saat ini kedua gudang tersebut belum dimanfaatkan karena menunggu proses renovasi dan menunggu mesin pengolahan beras.

- Hingga saat ini PT. Dhirga Surya Sumatera Utara masih menunggu persetujuan dari Gubernur terkait izin pengelolaannya, dan telah dilakukan Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik terkait nilai sewa mess.
- Program kerjasama keagenan PS0 3 Kg dengan Pertamina Ritel belum terlaksana karena masih menunggu izin pelaksanaan program dari Gubernur Sumatera Utara.

Upaya yang dilakukan oleh PT. Dhirga Surya dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Berusaha untuk menciptakan bisnis baru yaitu Beras Dhirga Surya Untuk Sumut Bermartabat sehingga dapat memberikan PAD ke Pemprov.
- Berkoordinasi dengan Bapemperda agar Perda perubahan segera diselesaikan.
- Berkoordinasi dengan BPKAD Provsu terkait dengan penyertaan modal yang dianggarkan agar segera terealisasi.
- Menunggu pengesahan rencana kerja anggaran Perusahaan Tahun 2021 untuk renovasi gudang dan pengadaan mesin pengolahan beras.
- Berkoordinasi dengan BPKAD melalui Biro Perekonomian Setdaprov, terkait izin prinsip pengelolaan mess pemprov.

3. PDAM Tirtanadi Provsu.

Target setoran PAD Rp. 25.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 27.639.000.000,-

Capaian kinerja PDAM Tirtanadi Provsu pada tahun 2020 yaitu:

1. Tambahan produksi sebesar 400 ltr/det.
2. Kontinuitas produksi air minum tetap terjaga.
3. Pelaksanaan pelelangan secara elektronik sudah diuji coba dan akan digunakan sepenuhnya pada Tahun 2021.
4. Pengelolaan data HRD secara terintegrasi sudah digunakan.
5. Pengelolaan rekening secara online dan terintegrasi sudah digunakan.
6. Pengelolaan permohonan pasang baru secara online sudah digunakan.
7. Pengendalian tingkat kehilangan air sudah selesai di 4 cabang.
8. Jumlah pelanggan baru melalui program L2t2 = 7.048 pelanggan (non perpipaan)

4. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

Target penyetoran PAD pada Tahun 2020 yaitu Rp. 1.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- atau 100% terealisasi.

Ada beberapa permasalahan yang dialami PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara selama tahun 2020 yaitu:

- Tidak tercapainya realisasi laba dari unit ini dikarenakan adanya kegiatan *Doking* pada tahun 2020.
- Tidak terealisasi pendapatan usaha unit ini sesuai target dikarenakan adanya pembatasan akibat Covid 19 dan pada bulan April, Mei, Juni dan Juli. Untuk bulan Agustus s/d Desember pendapatan kapal mengalami kenaikan dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019.
- Tidak tercapainya realisasi pendapatan dikarenakan ditundanya acara Sumut Fair 2020 dimana kontribusi pendapatan terbesar PRSU didapatkan dari nilai kontrak kerjasama penyelenggaraan Sumut Fair 2020.
- Situasi pandemi global C-19 yang tidak memungkinkan PRSU membuat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
- Kejelasan status hukum PT. PPSU untuk mengelola kawasan PRSU yang masih dalam proses legalisasi membuat PT. PPSU tidak bisa maksimal untuk menjual kawasan ini.
- Anggaran terbesar dari bidang ini direncanakan berasal dari pendapatan dan keuntungan pembangunan rumah bersubsidi (FLPP) namun proyek ini tidak dapat direalisasikan karena tidak mendapat persetujuan Pemegang Saham dengan mempertimbangkan situasi pandemi global C-19.
- Tidak terealisasinya bidang ini dikarenakan belum adanya pendapatan dari PI 10% di Blok Tonga Kabupaten Padang Lawas karena proses PI yang belum selesai di SKK Migas, dengan Kontraktor Pengelola Blok Tonga (EMP Tonga). Hal ini terjadi disebabkan adanya pandemi covid 19 sehingga semua proses tertunda.

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara adalah:

- Mengatur jadwal kapal sesuai kondisi di lapangan untuk memaksimalkan pendapatan dan pelayanan kepada penumpang.
- Menambah mitra kerja strategis untuk menggunakan jasa penyeberangan KMP Sumut I dan KMP Sumut II, misal Perusahaan Angkutan Umum, Perusahaan Transportasi BBM.
- Melakukan efisiensi biaya pada unit PRSU.
- Memproses legalitas PT. PPSU untuk mengelola kawasan PRSU sesuai aturan-aturan yang berlaku.
- Memaksimalkan pendapatan dari proyek-proyek konstruksi BUMD dan swasta.
- Melanjutkan kembali proses PI % di Blok Tonga dan blok-blok migas lainnya.

5. PD. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.

Pada tahun 2020 penyeteroran PAD dari PD. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara tidak terealisasi.

Ada beberapa capaian kinerja PD. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara pada tahun 2020 yaitu:

- Telah terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Dalam Perdagangan dan Distribusi Komoditi Cabai dan Bawang Merah.
- Telah terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Permasalahan yang dialami PD. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara antara lain:

- Target PAD Tahun 2020 belum dapat tercapai disebabkan pada tahun 2020 PD. Aneka industri dan jasa masih mengalami kerugian.
- Belum adanya gudang penyimpanan dan *Control Atmosfer Storage* (CAS) untuk tempat penyimpanan bawang dan cabai merah setelah diambil dari petani.
- Tempat pengambilan cabai dan bawang merah tidak tetap (berpindah pindah).

- Harga Pasar yang fluktuatif sehingga sangat penting untuk dilakukan penyetokan barang.
- Terkait kerjasama daerah masih dalam pendalaman kuantiti dan spesifikasi masalah produk.
- Saat ini masih dalam proses pembenahan/renovasi fasilitas umum antara lain toilet, pagar, lahan parkir, pintu gerbang dan *entrance gate*.
- Adanya asset yang masih tercatat dalam KIB Dinas Kehutanan yang dibutuhkan untuk penghapusan karena masih dalam bagian yang akan dironovasi.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- Melakukan pendekatan kepada seluruh OPD dan BUMD dilingkungan Pemprov untuk melakukan kebutuhan barang cetakan nya ke PD. Aneka Industri dan Jasa.
- Telah diusulkan melalui usulan penyertaan modal PD. AIJ untuk pembangunan gudang penyimpanan dan pengadaan *Control Atmosfer Storage (CAS)*.

6. PT. Bank SUMUT.

Berikut tabel informasi permodalan PT. Bank Sumut yaitu:

Tabel 8

Informasi Permodalan PT. Bank Sumut

Informasi Permodalan

Dalam Milyar Rupiah

Modal Disetor	Realisasi Anggaran		Realisasi % Saham
	Anggaran	Realisasi	
Pemerintah Provinsi	965	965	46%
Pemerintah Kab / Kota	1,118	1,115	54%
Total	2,083	2,080	100%

Keterangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha milik Daerah bahwa untuk mendorong kepemilikan saham Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara Pada PT Bank Sumut menjadi 51% sebagai pemegang saham pengendali. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyeteroran modal sebesar Rp. 100 miliar, direncanakan pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menambah setoran modal sebesar Rp. 127,7 Milliar yang berasal dari dividen modal disetor hasil RUPS Tahun 2019.

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut:

- Masih tertundanya proyek-proyek infrastruktur yang sumber dananya dari APBN/APBD, dikarenakan dana tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
- Kondisi perekonomian nasional yang masih menurun akibat dari pandemi Covid-19.
- Sebagian besar pengusaha/perusahaan masih melihat situasi ke depan (*wait and see*) dan menunda ekspansi usaha mereka.
- Pembiayaan syariah fokus kepada produk pembiayaan PMG sepeda motor untuk ASN.
- Manajemen Cost terhadap deposito yang berbiaya mahal dari segmen korporasi.
- Menjaga ratio LDR Bank Sumut
- Pertumbuhan kredit di bawah rencana, namun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga melebihi rencana yang ditargetkan.
- Adanya pencadangan CKPN Covid-19 dan tambahan biaya CKPN sehubungan dengan realisasi kredit hapus buku.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut:

- Melakukan strategi 4P yaitu:
 - *Product*: Adapun rencana produk yang ditawarkan antara lain: *Debit Card*, QRIS, Tarik Tunai Via *Modern Channel*, Sumut Net Individu, Aktivasi Pin ATM Via USSD dan *Bancassurance*.
 - *Program*: Adapun program yang akan dijalankan antara lain: Nabung Hadiah Langsung, Promo Aktivasi ATM, Racing Aktivasi Sumut *Mobile*, *Cashback* Sumut *Mobile*, Bebas biaya administrasi penarikan tunai di ATM Bank Lain, Sapa Pedagang, Promo Bank Sumut *T-money*, Promo Insentif Agen Sumut *Link* (Laku Pandai) dan Promo Kartu Debit.

- *People*: Dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga, Bank Sumut akan menempatkan tenaga pemasar (*Funding Sales Officer* dan *Priority Banking Officer*) yang akan ditempatkan di Unit Kantor Operasional Bank Sumut.
- *Place*: Wilayah pemasaran dibagi ke dalam 4 kategori lokasi yaitu:
 - ✓ *Residential*: Lokasi yang terdapat perumahan, rumah sakit, sekolah, supermarket.
 - ✓ *Office*: Lokasi dimana terdapat gedung atau ruko perkantoran baik swasta maupun pemerintah.
 - ✓ *Trading/Market*: Lokasi pasar dengan bangunan, terkonsentrasi permanen dan jumlah pedagang > 1.000 orang.
 - ✓ *Chinese Community*: Lokasi dimana terdapat komunitas, perdagangan yang mayoritas etnis Tionghoa.
- Meningkatkan ekspansi kredit dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- Meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- Peningkatan pendapatan kredit/pembiayaan seiring dengan pertumbuhan kredit.
- Efisiensi biaya operasional.
- Peningkatan pendapatan dari penyelesaian kredit bermasalah yaitu dari penagihan, lelang dan *Recovery Write Off*.
- Peningkatan *fee based income* dari *digital banking e-channel* Bank Sumut.

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Belanja Operasional APBD Renja Tahun Anggaran 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Rp.4.205.100.837,- (empat milyar dua ratus lima juta seratus ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal Rp.1.442.167.500,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 belum mencapai 100%. Hal ini tidak terlepas dari beberapa penyebab keberhasilan atau peningkatan dan kegagalan atau

penurunan.

1. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah:
 - a. Komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan target sebelum tahun anggaran berjalan.
 - b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya pada tindakan.
 - c. Diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi kemajuan organisasi.
 - d. Dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisik setiap triwulan, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
 - e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - f. Komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun UKPBJ Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - g. Melibatkan UMK dan Penyedia melalui kegiatan yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga Kegiatan dan Program bisa tercapai.
 - h. Sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, seperti Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta membantu Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
2. Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja yaitu:
 - a. Kekurangan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari formasi yang seharusnya 55 (lima puluh lima) orang yang telah direkomendasi oleh LKPP R.I.
 - b. Kurangnya fungsional umum untuk mendukung tugas-tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu.
 - c. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen batal dilaksanakan dikarenakan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan

dari LKPP RI.

d. Pembelian pada *e-purchasing* belum signifikan

Hasil yang dicapai pada program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Pemenuhan standar kematangan UKPBJ level 3 (proaktif).
2. Pengumuman RUP pada SiRUP per Desember 2021 sudah sesuai dengan Dokumen Anggaran.
3. Pembinaan dan pendampingan penerapan SPSE.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Transfer *knowledge* melalui Bimtek/Konsultasi pengadaan barang/jasa.
6. Pengembangan kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
7. Transaksi Bela Pengadaan sebesar Rp.1.221.595.061,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).
8. Penayangan 11 (sebelas) etalase produk katalog elektronik lokal Provinsi Sumatera Utara yaitu:
 - a. Jasa Tenaga Keamanan
 - b. Jasa Tenaga Kebersihan
 - c. Aspal *Hotmix*
 - d. *Ready Mix Beton*
 - e. *Agregat Base*
 - f. Goni Plastik uk.60x90
 - g. Sewa Kendaraan
 - h. Pakaian Dinas
 - i. Bahan Pokok
 - j. Makanan dan Minuman
 - k. Alat Tulis Kantor
9. Perencanaan, pembangunan dan penerapan SIRAJA SUMUT.

F. Biro Administrasi Pembangunan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah tolak ukur capaian kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Mengingat tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi

Pembangunan SetdaprovSU adalah menyelenggarakan program pemerintah dalam bidang perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Pembangunan Daerah, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU selalu berkoordinasi dengan OPD dan Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut.

Virus Covid-19 yang mewabah dan menjadi pandemi dunia di awal tahun 2020 tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Utara banyak mempengaruhi sendi kehidupan, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan Perangkat Daerah tidak bisa terlaksana, dengan maksimal dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan SKB 3 Menteri, Provinsi Sumatera Utara melakukan *refocussing* untuk penanganan Covid-19.

Dalam penyusunan Renja 2022 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Evaluasi renja Tahun 2020 tercantum dalam tabel berikut:

TABEL 9
(TABEL 3.1 LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020
PROVINSI SUMATERA UTARA

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	9	10	11	12 = (5+7+9)	13 = (10/4)		
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10	11	12 = (5+7+9)	13 = (10/4)	
1.20.1.20.0	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU	194,208,000	173,300,000	12	Bulan	12	Bulan	100%			

01	31	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan perjanjian Kerja (PK) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (rkpd) dan Rencana Kerja (Renja) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	8,904,375	8,790,000	-	-	-	-	0%					
01	32	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	9,874,375	9,350,000	12	Bulan	12	Bulan	100%					
01	33	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	27,000,000	24,025,000	54	Unit	100	Unit	185%					
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	45,995,010	44,434,800	1,733	Buah	1,733	Buah	100%					

	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	38,898,500	36,164,400	41,493	Lembar	41,443	Lembar	100%					
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	14,700,000	14,470,000	12	Bulan	12	Bulan	100%					
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Medan dan Luar Daerah	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	399,388,000	390,763,110	12	Bulan	12	Bulan	100%					
1.20.1.2 0.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
			Penyelenggaraan informasi elektronik melalui Website Biro Medan Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	Terpenuhinya Amanat Gubsu No. 2/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pel. Informasi dan Dok di Ling Pemprov	-	-	-	-	-	-	0%					

1.20.1.2 0.03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
	05	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Medan Teknis ASN	Meningkatnya Kualitas SDM pada Biro Adm Pembangunan	-	-	-	-	-	-	0%					
	05	18	Sosialisasi UKPBJ	Tersosialisasi kannya ULP	213,452,825	203,808,510					0%					
	05	20	Assesmen Anggota Pokja Pemilihan UKPBJ Pemprov	Terciptanya Anggota Pokja yang terlatih dan terupdate dalam Pengadaan Barang/Jasa	177,500,000	55,315,800	1	Kali	2	Kali	200%					
	05	38	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	Terdidik dan Terlatihnya Pejabat/ASN pada Pemprov			12	Bulan	12	Bulan	100%					
	05	39	Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Tersosialisasi kannya ULP			13	Bulan	13	Bulan	100%					
			Bimtek Penyusunan Dokumen Pengadaan, Penyusunan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak bagi Pokja dan	Terdidik dan Terlatihnya Pejabat/Pegawai ASN di Prov, dan Kab/.Kota			14	Bulan	14	Bulan	100%					

			Pengguna ULP Provinsi, Kab/Kota													
			Asesmen Anggota POKJA Pemilihan UKPBJ Pemprov	Terseleksinya Tim POKJA UKPBJ			15	Bulan	15	Bulan	100%					
			Penyusunan Standarisasi Pelayanan ULP	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)			16	Bulan	16	Bulan	100%					
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pokja ULP	Implementasi SOP ULP			17	Bulan	17	Bulan	100%					
1.20.1.2 0.03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
			Kegiatan UKPBJ dengan Pihak yang terkait Pengadaan Medan Barang/Jasa	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov	1,664,505,300	1,531,524,766	-	-	-	-	0%					
			Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Medan Kegiatan APBD Provsu	Tersedianya Buku Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	20,478,330	202,728,700	-	-	-	-	0%					

			Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD medan Provsu dan APBD Kab/Kota Se-Sumatera Utara serta Monev Sismontep TEPRAs Provinsi Sumatera Utara	Terdatanya Hasil Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota di sismontep TEPRAs oleh Pejabat Penghubung dan TEPRAs Provsu	79,494,100	78,072,000	-	-	-	-	0%					
			Penyusunan Standarisasi Pelayanan UKPBJ	Tercapainya standarisasi dalam pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provsu	99,999,475	99,801,175	-	-	-	-	0%					
			Rapat Koordinasi UKPBJ Provinsi dengan UKPBJ Kabupaten/Kota	Terkoordinir kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pemprovsu dengan Kab/Kota	99,999,000	89,500,800	1	Kali	-	Kali	0%					
			Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	Termonitornya penggunaan dana APBD Provsu			12	Laporan	12	Laporan	100%					

	06	08	Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/Kota Se Sumut serta Monev Sismontep TEPRAs Provsu	Terdatanya Hasil Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota di sismontep TEPRAs oleh Pejabat Penghubung dan TEPRAs Provsu			12	Bulan	12	Bulan	100%					
	17	44	Kegiatan ULP Dengan Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa	Terfasilitasinya pendukung kegiatan pengadaan Barang Jasa			12	Bulan	12	Bulan	100%					
			Penyusunan Standarisasi Pelayanan ULP	Terhimpunnya standarisasi dalam pembuatan dokumen pengadaan			12	Bulan	12	Bulan	100%					
1.20.1.2 0.03	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah													
	17	44	Kegiatan ULP Dengan Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu			17	Bulan	17	Bulan	100%					

4.06.4.0 6.03	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik													
		15	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	Terlaksananya Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU	347,819,349	345,234,013	12	Bulan	12	Bulan	100%					
		20	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	Pembekalan didalam penggunaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	78,946,760	52,151,660	1	Kegiatan	-	Kegiatan	0%					
		21	Peningkatan Penguatan Kelembagaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	Terciptanya Pelayanan Prima tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	89,997,575	86,111,275					0%					
		22	Rapat Koordinasi LPSE Kab/Kota se Sumatera Utara	Terevaluasinya perkembangan pengguna Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	199,524,900	189,844,600	1	Kegiatan	-	Kegiatan	0%					

				secara Elektronik												
		23	Koneksi Internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	Terlaksananya dan Terkoneksinya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	36,799,806	36,799,806					0%					
1.20.1.2 0.03	36		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah													
			Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada OPD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		378,774,150	372,259,612	12	Bulan	12	Bulan	100%					
			Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Medan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara		187,320,532	187,258,132	12	Bulan	12	Bulan	100%					
			Pengelolaan Program Perumahan Kawasan Permukiman		34,250,000	34,250,000	-	-	-	-	0%					

			Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Sumatera Utara Permukiman (PPSP) Provinsi Sumatera Utara		224,748,050	2,225,815,650	12	Bulan	12	Bulan	100%				
			Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Medan Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara		493,496,795	412,548,543	1	Kegiatan	-	Kegiatan	0%				
			Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia		427,447,625	340,337,506	1	Kegiatan	-	Kegiatan	0%				
			Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui		43,890,000	43,881,200	-	-	-	-	0%				

			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019												
			Pembinaan dan Dukungan kepada Pengembangan Medan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsum dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsum di Dalam dan Luar Negeri	230,236,700	213,436,700	8	Kab/Kota	7	Kab/Kota	88%					
			Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Umum Pemprovsum beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsum mengikuti Pekan Raya Jakarta	582,071,284	548,802,925	1	Kegiatan	-	Kegiatan	0%					
			Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Medan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	141,630,200	138,296,255	1	Kegiatan	-	Kegiatan	0%					

			Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terbina dan Terkendalinya Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	0%					
			Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi	Terbina dan Terkendalinya Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Non Konstruksi	141,162,550	141,162,550	-	-	-	-	0%					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI													
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	100	persen	57	persen	57%	
			Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	100	persen	47	persen	47%	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan	-	-	-	-	-	-	50,000	Dok	35,500	Dok	71%	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terinformasinya kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	5	Bulan	41%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja Biro	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	6	Bulan	49%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kelancaran Tugas Administrasi dan Keuangan Biro	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	4	Bulan	34%
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Kegiatan Pameran yang difasilitasi dan Jumlah Peserta yang difasilitasi pada Paviliun Pemprov di PRJ	-	-	-	-	-	-	3000 2000	Orang Orang	-	Orang Orang	0%

			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Peserta yang difasilitasi pada Paviliun Pemprov di PRSU	-	-	-	-	-	-	3,000	Orang	-	Orang	0%
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu dan Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan APBD Provsu	-	-	-	-	-	-	233	Eks Kab/ Kota	85	Eks Kab/ Kota	36%
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengendalian terhadap PPKP, PPSP, SDGS	-	-	-	-	-	-	91	Kab/ Kota Kab/ Kota Kab/ Kota	32	Kab/ Kota Kab/ Kota Kab/ Kota	35%
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provsu secara Rill	-	-	-	-	-	-	100	persen	38	persen	38%

G. Biro Organisasi

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Organisasi SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU.

Biro Organisasi SetdaprovSU menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2019–2020, Rencana Kerja Tahun 2020 Biro Organisasi SetdaprovSU memiliki 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.772.000.000,- terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 9 kegiatan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 1 kegiatan;
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 2 kegiatan.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, 12 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik, 1 kegiatan;
6. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara, 3 kegiatan.

Seiring waktu berjalan Tahun anggaran 2020 Program dan kegiatan Biro Organisasi SetdaprovSU mengalami perubahan dampak dari pandemi covid-19 sehingga program, kegiatan dan anggaran berubah menjadi 4 (empat) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar RP. 2.505.727.535,- terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 9 kegiatan; Rp. 649.306.171,-
2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, 10 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 1.609.076.871,-
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik, 1 kegiatan, dengan anggaran Rp. 12.488.000,-;
4. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara, 2 kegiatan. dengan anggaran Rp. 234.856.493,-.

G.1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari hasil evaluasi renja terhadap program dan kegiatan Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan capaian kinerja 95,00% karena ada kegiatan rutin yang tidak direalisasi semua yaitu jasa surat menyurat disebabkan jumlah surat yang dikirim ditentukan jumlah surat keluar yang dikelola dan kegiatan jasa peralatan kantor pengadaan disebabkan kenaikan harga per exemplar sehingga pembelian surat kabar dihentikan, hal tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Untuk keuangan terealisasi sebesar Rp. 2.346.978.380,- (93,66%) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.505.727.535,- ada sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 158.341.655,- hal ini disebabkan karena sisa dari pelaksanaan kegiatan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Capaian Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU

Tabel 10

**Pencapaian Kinerja Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2020
berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023%
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82,63	78,10	82,80	106,02	90,00	100%
5	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	11,64	11			15	100%

H. Biro Umum

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum pada Tahun 2019 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Biro Umum Setdaprovsu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2020 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyelesaian Pekerjaan : 92,06 %
 - Anggaran : Rp. 14.696.696.818
 - Realisasi : Rp. 13.530.833.466
 - Sisa : Rp. 1.165.863.352
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Penyelesaian Pekerjaan : 95,19 %
 - Anggaran : Rp. 49.570.599.814
 - Realisasi : Rp. 47.187.156.690
 - Sisa : Rp2.383.443.124
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
 - Penyelesaian Pekerjaan : 84,48%
 - Anggaran : Rp. 10.562.356.532
 - Realisasi : Rp. 8.923.236.420
 - Sisa : Rp. 1.639.120.112
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penyelesaian Pekerjaan : 89,30%
 - Anggaran : Rp. 1.752.476.455
 - Realisasi : Rp. 1.564.971.796
 - Sisa : Rp. 187.504.659
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - Penyelesaian Pekerjaan : 88,02 %
 - Anggaran : Rp. 16.159.932.301
 - Realisasi : Rp. 14.225.349.549
 - Sisa : Rp. 1.934.582.752
6. Program Pemeliharaan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara
 - Penyelesaian Pekerjaan : 99,07 %

Anggaran : Rp. 46.781.593.918
 Realisasi : Rp. 46.350.575.630
 Sisa : Rp. **431.018.288**

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Tahun 2020 tertuang pada sebagai berikut:

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi
Program Kegiatan Yang Tercantum Pada RKPD
Biro Umum Tahun Anggaran 2020

Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Anggaran APBD	P.APBD	Realisasi	Sisa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.431.773.486	14.696.696.818	13.530.833.466	1.165.863.352
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	5.395.760.000	5.259.598.722	4.755.273.202	504.325.520
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	613.960.000	619.115.000	596.543.000	22.572.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja	Medan	1 TA	3.778.390.475	4.076.475.875	3.899.679.350	176.796.350
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Medan	1 TA	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Medan	1 TA	749.999.211	737.530.311	551.836.600	185.693.711
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	1 TA	402.840.000	994.908.750	868.250.000	126.658.750
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	1 TA	75.253.800	75.253.800	73.517.000	1.736.800
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Acara Rapat, Makanan dan Minuman Pejabat dan Tamu	Medan	1 TA	174.820.000	174.820.000	122.850.000	51.970.000

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	3.198.750.000	2.337.494.360	2.331.548.076	5.946.284
Pajak Bumi Dan Bangunan	Persentase Pembayaran Iuran Pajak Bumi dan Bangunan	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	22.000.000	401.500.000	331.336.238	70.163.762
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				22.491.297.818	49.570.599.814	47.187.156.690	2.383.443.124
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Pool/KDH/WKDH/ Hibah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Medan	1 TA	4.020.000.000	13.561.900.200	13.406.900.200	155.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Medan	1 TA	2.375.110.200	6.478.516.700	5.915.635.395	562.882.305
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Medan	Gedung	2.484.300.000	2.460.642.800	2.460.642.800	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess	Frekuensi Pemeliharaan Mess-Mess Milik Pemprov	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	192.500.000	1.267.825.000	1.224.372.300	43.452.700
Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor	Medan	1 TA	300.000.000	567.550.000	363.324.500	204.225.500
Penyediaan Bahan Bakar Genset	Volume Ketersediaan Bahan Bakar Genset	Medan	1 TA	49.896.000	49.896.000	0	49.896.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	1 TA	2.755.950.000	8.695.647.750	8.290.541.576	405.106.174
Penambahan Daya Listrik Dan Air	Frekuensi Tersedianya Daya Listrik dan Air	Medan	1 TA	37.668.000	75.636.000	57.159.658	18.476.342
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi Perbaikan/Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Dalam Dan Luar Daerah	Kendaraan Dinas	4.418.007.050	8.176.011.350	7.750.343.711	425.667.639
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Frekuensi Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Medan	1 TA	863.764.934	1.181.189.184	1.050.046.300	131.142.882
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Frekuensi Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Medan	1 TA	1.671.066.634	3.072.265.842	2.925.851.250	146.414.592

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess Pemprov	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess Pemprov	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	3.238.535.000	3.783.518.988	3.543.520.000	239.998.988
Pemeliharaan Lift Kantor Gubsu	Frekuensi Pemeliharaan Lift Kantor Gubsu	Medan	1 TA	84.500.000	200.000.000	198.820.000	1.180.000
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				855.305.000	1.752.476.455	1.564.971.796	187.504.659
Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen Standar Satuan Harga	Medan	1 TA	0	424.171.455	421.957.960	2.213.495
Penyimpanan Barang Milik Pemprov	Jumlah Barang Milik Pemprov yang Disimpan	Medan	1 TA	113.400.000	444.650.000	441.107.000	3.543.000
Pemeriksaan Barang Daerah Hasil Pengadaan	Jumlah Barang Daerah Hasil Pengadaan yang Diperiksa	Medan	1 TA	194.015.000	194.015.000	143.929.600	50.085.400
Pembuatan Buku Agenda Kerja	Persentase Pelaksanaan Pembuatan Buku Agenda Kerja	Medan	Paket	93.500.000	291.500.000	285.250.500	6.249.500
Fasilitasi Kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitas Kinerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Medan	1 TA	382.390.000	326.140.000	201.288.736	124.851.264
Pemeliharaan Gudang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Frekuensi Pemeliharaan Gudang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Medan	1 TA	72.000.000	72.000.000	71.438.000	562.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				13.276.460.766	16.159.932.301	14.225.349.549	1.934.582.752
Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Di Lingkungan Setdaprov	Persentase Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Di Lingkungan Setdaprov	Medan	1 TA	392.390.000	392.390.000	303.659.000	88.731.000
Fasilitasi Kegiatan Tamu-Tamu Pemprov	Persentase Fasilitas Kegiatan Tamu-Tamu Pemprov	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	5.185.737.400	7.087.123.802	6.173.229.096	913.894.706

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI	Persentase Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI	Medan	Kegiatan	805.695.000	95.500.000	91.035.000	4.465.000
Penyelenggaraan Ketatausahaan Asisten Dan Staf Ahli	Persentase Penyelenggaraan Ketatausahaan Asisten Dan Staf Ahli	Dalam Dan Luar Daerah	Kegiatan	2.161.675.000	1.237.459.000	903.089.489	334.369.511
Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Medan	1 TA	628.840.000	598.560.000	557.938.000	40.622.000
Pengelolaan Arsip In Aktif Pada Gudang Arsip Kampung Baru	Jumlah Arsip In Aktif Kampung Baru yang Dikelola	Medan	1 TA	214.000.000	425.021.433	219.998.598	205.022.835
Penyelenggaraan Layanan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi	Medan	1 TA	216.000.000	216.000.000	214.314.000	1.686.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkantoran	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkantoran	Medan	1 TA	1.177.019.066	1.261.394.066	1.189.220.196	72.173.870
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Internal dan Eksternal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Internal dan Eksternal	Medan	1 TA	39.650.000	20.514.000	0	20.514.000
Peningkatan Kebersihan Mess Pemprov	Persentase Kebersihan Mess Pemprov	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	116.325.000	116.325.000	98.950.000	17.375.000
Peningkatan Operasional Pelayanan Mess Pemprov	Persentase Operasional Pelayanan Mess Pemprov	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	2.051.959.300	4.525.475.000	4.354.673.620	170.801.830
Penyimpanan Dan Pendistribusian Barang Hasil Pengadaan Biro Umum Dan Perlengkapan Setdaprov	Jumlah Barang Hasil Pengadaan Biro Umum dan Perlengkapan	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	25.670.000	25.670.000	7.720.000	17.950.000
Pendataan, Pengumpulan Dan Penyimpanan Aset Kondisi Rusak Berat Pada Gudang	Jumlah Aset Kondisi Rusak Berat Pada Gudang Kantor/Mess Pesanggrahan Pemprov yang	Dalam Dan Luar Daerah	1 TA	261.500.000	158.500.000	111.523.000	46.977.000

Kantor/Mess Pesanggrahan Pemprov	Terdata, Terkumpul, dan Tersimpan						
Program Pemeliharaan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara				45.860.432.968	46.781.593.918	46.350.575.630	431.018.288
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Medan	1 TA	40.499.960.530	40.576.810.530	40.400.380.530	175.430.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Medan	1 TA	5.360.472.438	6.205.783.388	5.950.195.100	255.588.288
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH				12.648.660.800	10.562.356.532	8.923.236.420	1.639.120.112
Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapan KDH/WKDH	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan KDH/WKDH	Medan	Paket	500.000.000	600.000.000	441.000.000	159.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Rumah Jabatan KDH/WKDH	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Rumah Jabatan KDH/WKDH	Medan	1 TA	2.204.000.000	2.240.000.000	2.223.899.800	16.100.200
Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH Dalam Memperingati Bulan Suci Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri	Persentase Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri yang Diselenggarakan OPD Terkait Keperluan KDH/WKDH	Dalam Dan Luar Daerah	Kegiatan	4.900.850.000	2.113.127.500	1.861.927.500	251.200.000
Fasilitasi Tamu-Tamu KDH/WKDH di Rumah Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Makan dan Minum Rumah Dinas KDH/WKDH	Medan	1 TA	4.543.810.800	5.109.229.032	4.396.409.120	712.819.912
Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH	Medical Check-Up	Luar Negeri dan Dalam Negeri	1 TA	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000
JUMLAH				116.162.019.89	139.523.655.838	131.782.123.551	7.741.532.287

I. Biro Administrasi Pimpinan

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Renja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU selama tahun 2021 dan perkiraan target pada tahun 2022.

Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Administrasi pimpinan SetdaprovSU pada Tahun Anggaran 2021.

Pada tahun 2021 Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU menerima anggaran sebesar Rp. 15.123.190.859,- yang di alokasikan untuk pelaksanaan 1 program dan 8 kegiatan. Realisasi kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 14.300.207.976,- atau dengan capaian kinerja sebesar 94,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Realisasi Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan
SetdaprovSU

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.123.190.859	14.300.207.976	94,56
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	252.700.000	224.118.300	88,69

	Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.100.000	130.589.200	90,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	107.600.000	93.529.100	86,92
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	582.263.430	555.300.000	95,37
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	582.263.430	555.300.000	95,37
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.575.041.400	1.412.708.312	89,69
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	534.182.000	515.622.287	96,53
	Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	187.714.000	176.661.400	94,11
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	258.162.500	248.992.125	96,45
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	284.914.900	212.243.900	74,49
	Sosialisasi Perundang-Undangan	310.068.000	259.188.600	83,59
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.465.199.815	4.093.896.224	91,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.731.300.558	2.468.986.267	90,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	591.594.780	591.229.780	99,94
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.097.000	155.097.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000	353.304.000	88,33
	Fasilitas Kunjungan Tamu	35.250.000	14.700.000	41,70
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	551.957.477	510.579.177	92,50
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.997.000	16.997.000	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.997.000	16.997.000	100
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	332.429.000	296.556.600	89,21
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.429.000	296.556.600	89,21
7	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.160.666.000	2.053.703.741	95,05
	Penyiapan Materi Pimpinan	986.108.000	948.570.741	96,19
	Fasilitas Komunikasi pimpinan	501.558.000	466.309.200	92,97
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	673.000.000	638.823.800	94,92
8	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	5.737.894.214	5.646.927.799	98,41
	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.162.970.000	1.120.440.500	96,34
	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.592.324.214	1.585.826.732	99,59
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.982.600.000	2.940.660.567	98,59

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Analisis kinerja pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan dirumuskan indikator yang mengukur kinerja pelayanan. Pelaksanaan program kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. namun ada beberapa kegiatan yg belum terealisasi secara 100 % (seratus persen) serapan anggaran karena, kondisi pandemi covid 19, yang membatasi pertemuan pertemuan secara langsung serta pembatasan perjalanan yang berdampak pada realisasi penyerapan anggaran.

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsumerupakan salah satu OPD pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Sehubungan dengan telah dikukuhkannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pergub No 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pergub No 37 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsumenjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsumempunyai tugas :

Membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan umum Pemerintahan atas pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi .dalam pengendalian urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, koordinasi

dan pengendalian atas pelaksanaannya. SetdaprovSU.

Struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah:

- a. Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan SetdaprovSU
- b. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual :
 - 1) Kasubbag Tata Usaha;
 - 2) Kasubbag Sarana dan Prasarana Spiritual;
 - 3) Kasubbag Kelembagaan Bina Spiritual.
- c. Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar
 - 1) Kasubbag Pendidikan;
 - 2) Kasubbag Kesehatan;
 - 3) Kasubbag Sosial.
- d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar:
 - 1) Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
 - 2) Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
 - 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU didukung dengan Sumber Daya Manusia yaitu sebanyak 46 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari:

- a) Jabatan Struktural : 12 Orang
- b) Staf/PNS : 31 Orang
- c) Staf/CPNS : 3 Orang

Untuk itu Rencana Kerja tahun 2022 Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU mengacu kepada 2 (dua) Program Pembangunan yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Kesejahteraan Rakyat

Penetapan Indikator Kinerja Utama erat kaitannya dengan pencapaian sasaran yang ditetapkan didalam Rencana Strategi Indikator Kegiatan, kajian terhadap capaian kinerja.

Tabel 13

**Indikator, target dan realisasi Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat
Setdaprovsu**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi OPD	Satuan	Target Sebelum Perubahan RKPD	Target Setelah Perubahan RKPD	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2021		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>11</i>		<i>15</i>
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG					
9	SEKRETARIAT DAERAH					
9.4	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen		70%	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
9.5	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen		70%	99.07%	Biro Kesejahteraan Rakyat

C. Biro Hukum

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2020) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan kemudian untuk mencegah terjadinya praktek mafia hukum/mafia peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Khusus mengenai upaya penegakan HAM yang juga termasuk salah satu program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, guna mendukung terwujudnya penegakan HAM di daerah-daerah, dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional penegakan HAM (RANHAM) yang pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai visi dan misi, Biro Hukum Setdaprovsu melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum Setdaprovsu adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi

berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Kewenangan Pemerintah Daerah kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2), Biro Hukum Setdaprovsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban Urusan Wajib yang dilaksanakan yaitu Urusan Wajib Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik
9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Biro Hukum SetdaprovSU.
10. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum SetdaprovSU dengan OPD lain.

Dalam perkembangan kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Biro Hukum SetdaprovSU diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi dengan OPD lain.

Berikut adalah Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan OPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD.

Tabel 14
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2020
Biro Hukum SetdaprovSU

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi dan OPD	SPM	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1.	Terlaksananya Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan sistematis	-	-	10 Draft Ranperda	35 Draft Ranperda	35 Draft Ranperda	6 Ranperda	10	35 Draft Ranperda	35 Draft Ranperda	
2.	Terwujudnya penyusunan Ranperda Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya	-	-	50 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	20 Kab/Kota	50	50 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	
3.	Terwujudnya pemahaman dan kesadaran Panitia RanHAM Kabupaten/Kota akan pentingnya penegakan HAM	-	-	40 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	40 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	40 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	35 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	36	40 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	40 Orang Panitia RANHAM Kab/Kota	

4.	Terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan perkara di Lingkungan Pemprov	-	-	20 Perkara	20 Perkara	110 Perkara	27 Perkara	30	20 Perkara	110 Perkara	
----	--	---	---	---------------	---------------	----------------	---------------	----	---------------	----------------	--

D. Biro Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- d. penyusunan kebijakan ekonomi makro dan mikro daerah;
- e. penyusunan dan penyajian data dan informasi ekonomi makro dan mikro daerah;
- f. fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah;
- g. fasilitasi kegiatan percepatan akses jasa keuangan ke usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- h. fasilitasi pemberdayaan kelembagaan/asosiasi/perkumpulan

perusahaan/pengusaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;

- i. fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- j. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- k. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- l. fasilitasi kegiatan pengembangan akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- m. penyelenggaraan administrasi Biro Perekonomian;
- n. pengelolaan kepegawaian Biro Perekonomian;
- o. pengelolaan keuangan Biro Perekonomian;
- p. pengelolaan barang/aset Biro Perekonomian;
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

Kepala Biro Perekonomian mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian;
- c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Sekretariat Daerah, perangkat daerah dan/atau instansi terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian;
- d. melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada Biro Perekonomian;
- e. melaksanakan bimbingan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber daya manusia Biro Perekonomian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Biro Perekonomian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 2. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
 3. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
- c. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 2. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 3. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.

Tabel 15

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan pendidikan/fungsional jabatannya

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
S3		
S2	3	2
S1	8	8
Diploma III	1	4
Diploma II		
Diploma I		
SLTA	4	3
SLTP		
SD		
Jumlah	16	17

Adapun analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Biro Perekonomian SetdaprovSU berdasarkan Indikator Kinerja dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian SetdaprovSU

No	Indikator	SPM/ Standar Minimal	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian	Proyeksi				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah			12 dokumen laporan	11 dokumen bahan kebijakan	11 dokumen bahan kebijakan	12 dokumen bahan kebijakan	12 dokumen bahan kebijakan	12 dokumen laporan	11 dokumen bahan kebijakan	11 dokumen bahan kebijakan	12 dokumen bahan kebijakan	12 dokumen bahan kebijakan	
2	Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD			6 BUMD Provsu dan 15 BUMD Kab/Kota	10 dokumen bahan kebijakan	10 dokumen bahan kebijakan	11 dokumen bahan kebijakan	11 dokumen bahan kebijakan	5 BUMD Provsu dan 25 BUMD Kab/Kota	10 dokumen bahan kebijakan	10 dokumen bahan kebijakan	11 dokumen bahan kebijakan	11 dokumen bahan kebijakan	

Dalam perubahan Rencana Strategis dilakukan juga perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 17
Perubahan Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian SetdaprovSU

No	Indikator	SPM/ Standar Minimal	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian	Proyeksi				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Persentase kebijakan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah			-	-	-	100 persen	100 persen	-	-	-	100 persen	100 persen	
2.	Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah			-	-	-	100 persen	100 persen	-	-	-	100 persen	100 persen	

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Acuan dalam menganalisis kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hasil kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dianalisis, sebagai berikut:

Tabel 18
Hasil kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.990.003.746	4.590.963.328		
				PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	2 Kegiatan	2 Kegiatan		

			sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Kegiatan	4 Kegiatan	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi PPK batal dilaksanakan dikarenakan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan dari LKPP.	Akan dilaksanakan sosialisasi terkait Ujian Sertifikasi PPK jauh hari sebelum pelaksanaan
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK				
				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Migrasi antara SPSE 4.3 – 4.4 – 4.5 memerlukan waktu untuk penyesuaian interface 2. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan tatap muka dengan narasumber dari LKPP di alihkan menjadi daring, sehingga terdapat efisiensi anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan sosialisasi terkait SPSE 4.4 dan 4.5 2. Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan kegiatan diperhitungkan secara matang
				Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelanjaan pada e-purchasing belum signifikan 2. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan tatap muka dengan narasumber dari LKPP dialihkan menjadi daring, sehingga terdapat efisiensi anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Sosialisasi terkait pemahaman bahwa e-purchasing adalah pilihan pertama dalam proses pemilihan penyedia 2. Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan kegiatan diperhitungkan secara matang

				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Efiseinsi modal filling cabinet dikarenakan sudah disediakan pada Kantor Gubernur	belanja cabinet filling Kantor	Untuk Belanja Modal Filling Cabinet agar diidentifikasi terlebih dahulu secara khusus menggunakan produk dalam negeri
				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Efisiensi belanja rutin pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa		Diharapkan di Tahun Anggaran 2022 lebih diperhitungkan terkait belanja rutin,
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Efisiensi perbaikan dan pemeliharaan Aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa		Pemeliharaan aset milik daerah diperhitungkan penyusutannya dan dikurangi anggarannya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Efisiensi Anggaran		Tahun Anggaran 2022

				Daerah				
				Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Pengadaan Penggandaan tidak terserap dikarenakan mesin fotocopy triwulan III sudah di adakan, sehingga pada triwulan IV tidak ada penggandaan.	Tahun Anggaran 2022 biaya Penggandaan tidak dianggarkan kembali.

Tabel 19

Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2021

	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)
		(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.990.003.746	4.590.963.328	92,00
1.1	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.453.293.534	1.301.036.573	89,52
1.1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	112.744.000	112.735.000	99,99
1.1.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	998.276.352	899.201.988	90,08
1.1.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	342.273.182	289.099.585	84,46
1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.805.554.056	1.722.351.278	95,39
1.2.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	388.722.056	380.547.556	97,90
1.2.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.230.837.500	1.173.657.400	95,35
1.2.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	185.994.500	168.146.322	90,40
1.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.731.156.156	1.567.575.477	90,55
1.3.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	517.728.352	477.710.850	92,27
1.3.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	610.420.000	513.072.500	84,05
1.3.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	603.007.804	576.792.127	95,65
1.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.731.156.156	1.567.575.477	90,55
1.3.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	517.728.352	477.710.850	92,27
1.3.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	610.420.000	513.072.500	84,05
1.3.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	603.007.804	576.792.127	95,65
TOTAL.....		5.647.268.337	5.165.949.908	91,48

F. Biro Administrasi Pembangunan

Acuan dalam menganalisis kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keberhasilan kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 20
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu
Tahun 2019

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi peserta pada pameran di dalam dan luar negeri			1,000,000,000	500,000,000	404,500,000	500,000,000	500,000,000	838,971,270	213,436,700	404,500,000	500,000,000		
2	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan			250,000,000	600,000,000	204,975,250	250,000,000	250,000,000	147,970,705	202,728,700	204,975,250	250,000,000		
3	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah yang terealisasi			4,000,000,000	2,600,000,000	1,924,696,764	2,000,000,000	2,000,000,000	1,830,854,206	1,531,524,776	1,924,696,764	2,000,000,000		
4	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam Administrasi Pembangunan							3,300,000,000					3,500,000,000	
5	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi P2 Sumut							2,000,000,000					3,000,000,000	

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada kontrak kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SetdaprovSU berdasarkan dokumen penetapan kinerja masing-masing, maka program/kegiatan strategis Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SetdaprovSU Tahun Anggaran 2020 yang telah terjadwal dan berkelanjutan menghasilkan:

1. Kegiatan UKPBJ dengan pihak yang terkait pengadaan barang/jasa
2. Pendataan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan bulanan kegiatan APBD Provsu
3. Pengkoordiniran dan pelaporan aktivitas pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/kota se Sumut serta Monev Sismontep TEPEA Provsu
4. Operasional LPSE Provsu
5. Pengendalian kegiatan APBD Provsu pada OPD/UPT di lingkungan Provsu
6. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan APBD Provsu
7. Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu
8. Pengorganisasian dan pengkoordiniran instansi terkait PemprovSU beserta mitra binaannya dalam rangka pembinaan dan fasilitasi paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara.
9. Pengorganisasian dan pengkoordiniran instansi terkait PemprovSU beserta mitra binaannya dalam rangka pembinaan dan fasilitasi paviliun PemprovSU mengikuti Pesta Pulau Pinang di Pulau Pinang Malaysia
10. Pembinaan dan dukungan kepada Dekranasda dan Instansi terkait PemprovSU dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi lainnya melalui Stand PemprovSU didalam dan Luar Negeri.
11. Pengorganisasian dan pengkoordinasian instansi terkait PemprovSU beserta mitra binaannya dalam rangka pembinaan dan fasilitasi paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Jakarta.

Tabel 21

Rencana Kerja Anggaran Perubahan menurut Program Kerja dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	Program	APBD TA. 2020 (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Refocussing	Setelah Perubahan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.055.706.670,-	498.738.200,-	682.317.700,-
2.	Program Peningkatan	112.500.000,-	112.500.000,-	112.500.000,-

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
3.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.151.132.164,-	990.967.638,-	1.137.247.145,-
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	492.862.700,-	227.295.600,-	227.296.100,-
5.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.840.415.735,68,-	934.648.692,68,-	1.300.550.759,68,-
JUMLAH		6.652.617.269,68,-	2.764.150.130,68,-	3.459.911.704,68,-

Hasil Yang Dicapai

Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Dunia juga berdampak pada hasil yang di capai pada Tahun 2020. Dari berbagai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, maka diperoleh hasil kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri.

Tabel 22

Rincian Anggaran *Refocusing* dan P.APBD OPD Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Nama Kegiatan	Rencana Pelaksanaan	Tempat	Anggaran	Anggaran Refocussing	Anggaran P.APBD	Ket
1	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara	20 Maret - 20 April 2020	Medan	425.112.095	3.075.000	NIHIL	Berdasarkan surat Sekdaprov No. 520.13/13205 tanggal 06 Desember 2019 tentang Penyelenggaraan PRSU Ke-49 Tahun 2020 Biro Administrasi Pembangunan dan PBJP Setdaprov melakukan rapat sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 24 Februari 2020 dan pada tanggal 3 Maret 2020 maka dana sebesar 3.075.000,- digunakan untuk keperluan rapat dimaksud, pada tanggal 19 Maret 2020 Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan surat Nomor 510.13/2801 terkait Penundaan Pelaksanaan Sumut Fair 2020

2	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Pekan Raya Jakarta	14 Mei – 28 Juni 2020	Jakarta	507.258.248	NIHIL	708.329.424	Refocussing Tahap I untuk Anggaran Murni di hapus. Sehubungan dengan surat Marketing Director PT. Jakarta International Expo tanggal 06 April 2020 terkait Penundaan Pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran 2020 yang semula diselenggarakan pada tanggal 14 Mei – 28 juni 2020 diubah menjadi tanggal 22 Desember 2020 – 31 Januari 2021 (sesuai surat Marketing Director PT. Jakarta International Expo tanggal 28 Agustus 2020). Pada tanggal 02 September 2020 Biro Administrasi Pembangunan dan PBJP Setdaprov su menyurati Ibu Sekretaris Daerah Prov su selaku Ketua Tim TAPD Prov su perihal Penyampaian Penambahan Anggaran pada APBD Perubahan TA. 2020 Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprov su untuk mengikuti Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair Kemayoran) dengan penambahan Anggaran menjadi 708.329.424,-. Kemudian pada tanggal 19 November 2020 Marketing Director PT. Jakarta International Expo menyurati kembali Perihal Informasi Penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2020 dibatalkan untuk tahun 2020 dan akan dilaksanakan pada Tahun 2021. (Dananya disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara).
3	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia	01 s/d 31 Desember 2020	P.Penang	420.155.997	358.205.997	NIHIL	Penyelenggaraan Pesta Pulau Pinang Tahun 2020 dibatalkan sesuai surat Pegawai Kewangan Negeri Pulau Pinang tanggal 4 September 2020.

4	Pembinaan dan Dukungan kepada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov su dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov su di Dalam dan Luar Negeri :	SATU TAHUN ANGGARAN		407.498.400	107.332.800	90.280.000	Pada Tahun 2020 semua kegiatan pameran baik di Sumatera Utara maupun diluar Provinsi Sumatera Utara ditiadakan akibat wabah pandemi Covid 19 maka Anggaran Perubahan P. APBD digunakan untuk mendata dan meninjau produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari beberapa kabupaten yaitu : Kab. Toba, Kota Padang Sidempuan, Kota Tj Balai, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Asahan, Kab. Humbang Hasundutan dan Kab. Batubara. Tujuan dilaksanakannya pendataan dan peninjauan ini agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kab/Kota dapat diprioritaskan untuk mengikuti pameran yang akan di laksanakan pada Tahun 2021.
---	--	---------------------	--	-------------	-------------	------------	---

2. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu.

Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprov su sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya melakukan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas/Badan/Instansi Pengguna Anggaran APBD Provsu, sehingga dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tepat waktu dan tepat sasaran.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprov su melalui kegiatan Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provsu TA. 2020 telah menghimpun data setiap bulan secara pengiriman manual oleh OPD Pemprov su dan melalui Aplikasi serta dijadikan satu buku laporan khusus, serta mengevaluasi perkembangan pelaksanaan APBD Provsu TA. 2020.

Maksud dan Tujuan

- ✓ Mengetahui perkembangan keadaan fisik dan keuangan APBD Provsu pada masing-masing Pengguna Anggaran.
- ✓ Mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi Instansi Pengguna APBD Provsu serta solusi tindak lanjutnya.

Saran/Tindak Lanjut

- ✓ Agar masing-masing instansi pengguna APBD Provsu dapat secara rutin setiap bulan menginput dan melaporkan dengan tepat waktu keadaan fisik dan keuangan dengan hardcopy serta softcopy ke Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu.
 - ✓ Sudah dibangunnya aplikasi e-pelaporan P2_Sumut realisasi fisik dan keuangan APBD.
 - ✓ Akan diberikan surat teguran kepada OPD pemakai dana APBD Provsu agar segera menyampaikan laporan bulanan dimaksud.
3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 Hasil Dicapai:
- ✓ Terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 50 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.
 - ✓ Pedoman Bagi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2020.
 - ✓ Alokasi Anggaran sebelum perubahan Rp. 212.798.000,-, setelah perubahan Rp. 35.447.840,- Realisasi Anggaran Rp.35.353.840,-.

Saran/Tindak Lanjut:

- ✓ Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara agar lebih efektif, efisien, tepat mutu, waktu dan tepat sasaran sesuai target yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara menjadi ketentuan dan peraturan serta pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah didalam pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara.
 - ✓ Untuk dapat diintegrasikan ke dalam Aplikasi e-sumut yang setiap awal tahun untuk dapat dipedomani oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pemakai dana APBD Provinsi Sumatera Utara
4. Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada OPD/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Hasil yang dicapai:

- ✓ Terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/229/KPTS/2020 tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.
- ✓ Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa UPT OPD Teknis di Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan administrasi di Bidang pengelolaan Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan (Laporan Perjalanan Dinas).
- ✓ Koordinasi dan Konsultasi dengan melakukan perjalanan dinas ke Kementerian Terkait yang mendukung pengawasan administrasi di Bidang pengelolaan Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan (Laporan Perjalanan Dinas).
- ✓ Alokasi Anggaran sebelum perubahan Rp. 487.060.295,68,-, setelah perubahan Rp. 319.194.495,68,- Realisasi Anggaran Rp.318.794.388,-.

Saran dan harapan :

- ✓ Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara dapat lebih efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran.
 - ✓ Kegiatan ini bermanfaat dan menjadi satu tolak ukur bagi Sekretariat Daerah sebagai perpanjangan tangan Gubernur Sumatera Utara di dalam membina OPD terkait sehingga Gubernur Sumatera Utara mendapat informasi yang tepat dan akurat terhadap kegiatan fisik di lapangan.
 - ✓ Memiliki tenaga ahli yang mumpuni untuk kegiatan dimaksud sehingga keadaan realisasi fisik dan anggaran tidak terdapat gap yang tinggi.
 - ✓ Pengembangan Aplikasi P2Sumut di dalam menunjang kegiatan pengendalian fisik dan bermanfaat bagi OPD pengguna aplikasi.
5. Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu
- Hasil:
- ✓ Tercapainya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/ 9288/ SJ, tanggal 19 Desember 2017, Tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah.
 - ✓ Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa Kabupaten/ Kota dalam rangka peninjauan pelaksanaan pembangunan sanitasi baik fisik maupun non fisik.
 - ✓ Koordinasi dan Konsultasi dengan melakukan perjalanan dinas ke Kementerian terkait yang mendukung Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Laporan Perjalanan Dinas).
 - ✓ Alokasi Anggaran sebelum perubahan Rp. 210.392.400,- setelah perubahan Rp. 76.612.000,- Realisasi Anggaran Rp. 76.603.000,-.

Saran dan harapan:

- ✓ Peran dari Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara lebih menonjol di tahun 2021 melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri
 - ✓ Kegiatan pelaksanaan pembangunan sanitasi bermanfaat dan menjadi suatu tolak ukur bagi Sekretariat Daerah sebagai perpanjangan tangan Gubernur Sumatera Utara didalam membina OPD terkait sehingga Gubernur Sumatera Utara mendapatkan informasi yang tepat dan akurat terhadap kegiatan fisik dan non fisik di lapangan
6. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

Hasil:

- ✓ Terlaksananya persentase pengadaan barang/jasa yang efisien dan akuntabel dimana untuk jumlah paket yang ditargetkan tahun 2020 melebihi dari target.
- ✓ Untuk alokasi anggaran mencapai 98% dengan telah terlaksanakannya beberapa kegiatan.

Tabel 23

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Provsu

Nama Program	Kegiatan	Hasil Dicapai*	Anggaran (Rp)	Anggaran Refocussing (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Assesmen Anggota Pokja Pemilihan UKPBJ Pemprov	Terlaksananya Pembinaan kepada Pokja Pemilihan	112.500.000	-	-	112.489.000
II. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan UKPBJ dengan Pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Operasional kebutuhan UKPBJ Provsu	1.626.039.814	649.892.438	647.832.895	601.480.540
III. Peningkatan Kapasitas Informasi Publik	Operasional LPSE Provsu	Terlaksananya Operasional LPSE Provsu	236.623.600	227.295.600	227.296.100	225.888.500
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis LPSE Provsu	-	78.123.200	0	0	0
	Rapat Koordinasi LPSE Kab/Kota se-Sumatera Utara	-	178.115.800	0	0	0

Tabel 24

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditenderkan Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Jumlah Paket	Pagu Anggaran (Rp)
1	Barang (B)	117	138.590.343.584,-
2	Pekerjaan Konstruksi	185	833.328.049.629,-
3	Jasa Konsultasi (JK)	91	47.728.357.430,-
4	Jasa Lainnya (JL)	72	113.357.210.387,-
	Jumlah	465	1.133.003.961.030

Sementara jumlah penyedia yang terdaftar di LPSE s.d tahun 2020 sebanyak 5.395 penyedia/perusahaan.

G. Biro Organisasi

a. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah efisiensi struktur dengan slogan “Tepat Struktur dan Tepat Fungsi”. Pada Pasal 16 huruf c jo Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat (4), menyebutkan bahwa Pengendalian Penataan perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara evaluasi struktur organisasi, terdiri dari besarnya organisasi, susunan perangkat daerah, pewadahan dan perumpunan, tugas dan fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti peraturan yang diterbitkan oleh pusat yang tertera diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur tentang No. 1 Thn 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diselesaikan pada tanggal 16 Januari 2020 dan diundangkan tanggal 24 Januari 2020;
- b. Pergubsu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provsu; selesai pada bulan Juni 2020.
- c. Pergubsu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu; selesai pada bulan Mei 2020;
- d. Pergubsu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Pergub Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provsu; selesai pada bulan Februari 2020;
- e. Pergubsu Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Provsu; selesai pada bulan Juni 2020;

- f. Pergub Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provsu; selesai pada bulan Juni 2020;
- g. Pergub Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengalihan Tugas Biro Humas ke Dinas Komunikasi dan Informatika selesai pada bulan Februari 2020;
- h. Rancangan Peraturan Gubernur tentang SOTK dan tentang Tusi Dinas PMPPTSP selesai bulan Maret 2020, saat ini sedang dieksaminasi di Biro Hukum Setdaprovsu. Pergub ini implementasi penyederhanaan birokrasi peniadaan jabatan pengawas/ eselon IV pada 5 (lima) Bidang;
- i. Peraturan Gubernur tentang Tusi BKD (selesai bulan Februari 2020) dan Inspektorat (selesai bulan Januari 2020);
- j. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah selesai menginventarisasi jumlah jabatan pengawas/eselon IV pada Dinas/Badan yang menangani tugas terkait dengan pemberian perizinan dan non perizinan serta investasi yang akan ditiadakan/dihapus, bahan/data telah disampaikan ke Kemendagri RI, selesai final bulan Juni 2020;
- k. Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka 2 (dua) Draf Pergub SOTK Dinas Provsu dan Draf Pergub SOTK Badan-Inspektorat Provsu, telah disampaikan ke Biro Hukum Setdaprovsu untuk eksaminasi;
- l. Evaluasi UPT Dinas/Badan pada bulan November 2019, hasil evaluasi telah disampaikan ke Biro Hukum Setdaprovsu untuk eksaminasi 1 (satu) draf Pergub SOTK cabang Dinas/UPT pada Dinas/Badan Provsu.

b. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

Biro Organisasi Setdaprovsu telah mengeluarkan rekomendasi penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota:

1. Usulan penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Fasilitasi Peraturan Bupati Nias Barat terkait kelembagaan Perangkat Daerah;
3. Penyederhanaan Birokrasi;

4. Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 5. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Penjelasan lahan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119;
 7. Penataan Kelembagaan pada urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan UPTD satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara;
 8. Rekomendasi pembentukan UPTD Kabupaten Serdang Bedagai;
 9. Penjelasan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
 10. Pelaksanaan Permendagri No. 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 11. Penataan Kelembagaan Inspektorat Kota Gunungsitoli;
 12. Rekomendasi Pembentukan UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 13. Usulan Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Selatan;
 14. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 15. Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Gunungsitoli;
 16. Permohonan Konsultasi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 17. Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 18. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
 19. Rekomendasi pembentukan UPTD Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Biro Organisasi SetdaprovSU telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 188.44/s76/KPTS/2020 tentang Penggunaan *e-Sianjab* dalam Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Provinsi. Sosialisasi penggunaan

Aplikasi *e. Sianjab* dan 49 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Penginputan data Anjab, ABK, ke Aplikasi *e-Sianjab*.

Dari hasil capaian indikator kinerja sasaran 1 dapat dilihat capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 100 % sesuai dengan klasifikasi penilaian yang ditetapkan termasuk dalam interval 75-100% dengan predikat **Baik**.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	78,10	82,80	106,02%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 sebagaimana tercantum pada tabel diatas, selanjutnya disajikan analisis capaian target indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PANRB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemberian penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai

kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik yakni persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran dan prasarana.

Survei kepuasan masyarakat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan kepada 26 (dua puluh enam) perangkat daerah /unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada 26 (dua puluh enam) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (SINIKEMAS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil survey terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diukur dan diperoleh hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 25
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada 26 Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

No	Perangkat Daerah/Unit	Nilai IKM	Ket
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	95,56	Sangat Baik
2	Badan Penelitian dan Pengembangan	93,50	Sangat Baik
3	Biro Organisasi SetdaprovSU	85,76	Baik
4	Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU	92,69	Sangat baik
5	Badan Kepegawaian Daera	82,59	Baik
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	82,61	Baik
	- UPPD BPPRDSU Balige	86,97	Baik
	- UPPD BPPRDSU Sidikalang	83,69	Baik
	- UPPD BPPRDSU Dolok Sanggul	77,79	Baik

	- UPPD BPPRDSU Kabanjahe	83,05	Baik
	- UPPD BPPRDSU Kota Pinang	82,25	Baik
	- UPPD BPPRDSU Lubuk Pakam	96,51	Baik
	- UPPD BPPRDSU Padang Sidempuan	84,70	Baik
	- UPPD BPPRDSU Pematang Siantar	73,88	Baik
	- UPPD BPPRDSU Sipirok	75,76	Baik
	- UPPD BPPRDSU Lima Puluh	82,87	Baik
	- UPPD BPPRDSU Tanjung Balai	79,75	Baik
	- UPPD BPPRDSU Binjai	81,87	Baik
	- UPPD BPPRDSU Gunung Sitoli	78,87	Baik
	- UPPD BPPRDSU Gunung Tua	85,35	Baik
	- UPPD BPPRDSU Aek Kanopan	81,96	Baik
	- UPPD BPPRDSU Medan Selatan	76,69	Baik
	- UPPD BPPRDSU Pandan	82,04	Baik
	- UPPD BPPRDSU Panyabungan	78,08	Baik
	- UPPD BPPRDSU Rantau Prapat	84,75	Baik
	- UPPD BPPRDSU Sibolga	76,89	Baik
	- UPPD BPPRDSU Stabat	78,72	Baik
	- UPPD BPPRDSU Tebing Tinggi	84,01	Baik
	- UPPD BPPRDSU Teluk Dalam	91,67	Sangat Baik
	- UPPD BPPRDSU Medan Utara	83,86	Baik
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83,16	Baik
8	Dinas Energi an Sumber Daya Mineral	98,75	Sangat baik
	- UPT Lab ESDM	83,22	Baik
9	Dinas Sosial	80,06	Baik
10	Dinas Kesehatan	75,84	Baik
	- UPT. RSK Mata	90,20	Sangat Baik
	- UPT Laboratorium Kesehatan	77,81	Baik
	- UPT RS Indrapura	73,21	Kurang Baik
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	78,10	Baik
12	Dinas Kehutanan	84,22	Baik
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	81,45	Baik
	- UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	82,65	Baik
	- UPT Inseminasi Buatan	83,02	Baik
	- UPT Kesehatan Masyarakat Venteriner	90,48	Sangat Baik
	- UPT Klinik Hewan	88,15	Baik
	- UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang	82,50	Baik
	- UUPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona	81,32	Baik
	- UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak	80,88	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup	86,60	Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89,32	Sangat Baik
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	93,50	Sangat Baik
17	Dinas Perkebunan	83,05	Baik
	- UPT Perbenihan	80,30	Baik

18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	78,47	Baik
19	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara - Cabang Dinas Pendidikan Gunung Sitoli - Cabang Dinas Pendidikan Kisaran - Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam - Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan - Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara - Cabang Dinas Pendidikan Padang Sidempuan - Cabang Dinas Pendidikan Sunggal - Cabang Dinas Pendidikan Stabat - Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah	83,29 78,38 77,61 79,75 81,13 91,30 83,29 89,65 82,50 84,33	Baik Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Baik Baik
20	Dinas Tenaga Kerja	86,78	Baik
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	85,25	Baik
22	Dinas Perhubungan	81,13	Baik
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	82,83	Baik
24	Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem	83,39	Baik
25	Rumah Sakit Umum Haji Medan	79,84	Baik
26	Dinas Tanaman dan Holtikultura - UPT BI Aneka Tanaman Gabe - UPT BI Tanaman Hias dan Biofarmaka - UPT Benih Induk Aneka Umbi - UPT Benih Induk Tanaman Perkebunan - UPT BI Padi Murni Tanjung Morawa - UPT BI Aneka Tanaman Pantai Timur - UPT BIH Kuta Gadung - UPT Mekanisasi - UPT BI Palawija Tanjung Selamat - UPT Pelatihan dan Penyuluhan - UPT Benih Induk Aneka benih - UPT Perlindungan - UPT Pelatihan dan Penyuluhan	80,93 82,74 83,29 89,38 85,25 83,88 82,50 89,59 77,55 82,63 78,75 89,38 82,25 78,75	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik
TOTAL		82,80	BAIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat, memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;

4. Biaya/Tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan; dan
9. Sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 82.80. Dengan angka Indeks sebesar 82,80, maka kinerja Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “B” dengan mutu pelayanan **BAIK**, karena berada dalam nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76.61 – 88.3.

Tabel 26
Nilai Rata-rata (NRR), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Unsur Pelayanan pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

NO.	Unsur Pelayanan	NRR	Ket
1	Prosedur Pelayanan	3,2	Baik
2	Persyaratan Pelayanan	2,96	Baik
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,56	Sangat Baik
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	2,98	Baik
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,14	Baik
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,04	Baik
7	Kecepatan Pelayanan	2,9	Baik
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	2,82	Baik
9	Kesopanan Keramahan Petugas	3,08	Baik

Rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai Interval IKM 2.82 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu diperbaiki.

Dari tabel 26 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah kejelasan petugas layanan dengan nilai 3.56 dan Prosedur Pelayanan dengan nilai 3.2. Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur keadilan mendapatkan pelayanan dengan nilai 2,82 dan kecepatan pelayanan dengan nilai 2,9. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh pada unsur kejelasan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan, sedangkan pada unsur keadilan

mendapatkan pelayanan dan kecepatan pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah.

Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya baik dan masyarakat sudah mulai merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Dan unsur-unsur dengan NRR kurang dari 3.065 masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Dari 9 (sembilan) unsur yang dinilai secara keseluruhan dapat dikategorikan telah mencukupi unsur nilai Indeks kepuasan Masyarakat di atas 82.80 sehingga mutu pelayanan BAIK.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, yaitu **keadilan mendapatkan pelayanan** dan kecepatan pelayanan. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi, yaitu Kejelasan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan harus tetap dipertahankan.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	11		

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran staregis 3 sebagaimana tercantum pada tabel diatas, tidak dapat disajikan analisis capaian target indikator kinerja karena masih menunggu hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB.

H. Biro Umum

Dalam mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada unit-unit kerja lingkup pemerintah daerah dan masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*) dalam proses pemberian pelayanan

publik dalam rangka mendukung pendistribusian surat dan pelaksanaan pelayanan kedinasan KDH/WKDH serta penggunaan mess/wisma tamu/pesanggrahan yang dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu.

Gambaran keberhasilan disini hanya merupakan upaya mengkuantifikasi ukuran–ukuran keberhasilan yang tidak terlepas dari kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Hal ini disebabkan organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Secara umum pelaksanaan dan fungsi Biro Umum Setdaropvsu telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Kebijaksanaan pada dasarnya adalah ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran agar diimplementasikan melalui program dan kegiatan secara operasional. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka dipandang perlu untuk menetapkan strategi pencapaian target.

Untuk kepentingan keterarahan pelaksanaan upaya merealisasikan visi dan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan yang berpijak kepada nilai norma yang ada untuk itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Menargetkan batas waktu penyelesaian program kerja dan peningkatan pelaksanaan tugas.
- b. Perlu peningkatan, pemahaman para pejabat pengelola penataan ketatalaksanaan dan peningkatan tatakerja birokrat mengenai pradigma baru dibidang pemerintah dan pembangunan menuju *Good Governance*.
- c. Perlu adanya transparansi program kegiatan Biro Umum kepada masyarakat melalui media informasi.

I. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah

mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah.

Dalam urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu. Kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu berupa penyediaan dan penyiapan materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk urusan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu adalah pelayanan keprotokolan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan berupa fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan. Fasilitasi kunjungan tamu mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun untuk realisasi anggarannya mencapai sekitar 97%, yang mengindikasikan bahwa capainya dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovs yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel 27

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Persentase fasilitasi materi pimpinan			100%	100%	100%	95%				

2	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	98%				
---	--	--	--	------	------	------	-----	--	--	--	--

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Tabel 28

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
				Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar Kewenangan OPD)	
1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	Sebagian PNS kurang disiplin dalam bekerja	Penerapan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Kurangnya keberanian OPD untuk mengambil tindakan tegas	Tidak adanya petugas/ instansi eksternal yang melakukan analisa dan evaluasi Terhadap PNS secara rutin	Penerapan peraturan dan ketentuan disiplin PNS belum terlaksana dengan sempurna
		Terbatasnya staf yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tupoksi	Disiplin ilmu PNS disesuaikan dengan tupoksi	Tidak semua pegawai memahami peraturan terkait tupoksi dan memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tupoksi	Keterbatasan Jumlah PNS yang berdisiplin ilmu sesuai tupoksi yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU	Terbatasnya PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan Tupoksi
2	Pembentukan Daerah Otonom Baru	Adanya usulan pemekaran daerah	. Peraturan Perundang-undangan tentang pemekaran daerah	Usulan pemekaran sudah diteruskan ke pusat, namun belum direspon karena moratorium belum dicabut.	Belum ditetapkannya rumusan Desertada 2010-2025 dan belum adanya pencabutan moratorium	Terbukanya Peluang pembentukan Daerah Otonom Baru Kab/Kota dan Provinsi sementara moratorium belum dicabut
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Masih dalam tahapan sosialisasi	Penerapan Standar Pelayanan Minimal di	Belum diterapkannya standar pelayanan minimal	Belum optimalnya penerapan Standar	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

	Pemerintah	penerapan SPM pemerintah	Provinsi dan kab/kota	pemerintah	Pelayanan Minimal di kab/kota dan provinsi	pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
4	Peningkatan Kerjasama antar daerah nasional dan internasional	Peran OPD hanya dalam tahap pelaporan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kerjasama	Peturan perundangan terkait kerjasama	Belum adanya database yang cukup baik terkait kerjasama antar daerah, nasional dan internasional di seluruh Indonesia	Kurangnya kesadaran akan potensi daerah yang akan dikerjakasikan antar daerah belum dijadikan sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan	Meningkatnya keinginan daerah dalam melakukan kerjasama skala nasional dan internasional
5	Pembinaan Aparatur Pemerintah Kab/Kota	Belum optimalnya pembinaan pada aparatur pemerintah Kab/Kota	Peraturan perundangan yang berlaku	Belum optimalnya standar pelayanan dimasing-masing pemerintah Kab/Kota	Kualitas SDM yang kurang kualitas koordinasi belum optimal dan sinergi dengan pemerintah lainnya	Belum maksimalnya kinerja aparatur Kab/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6	Penyelesaian penegasan batas daerah	Belum terselesainya penegasan batas di beberapa Kab/Kota	Permendagri Nomor 141 Tahun 2014	Belum optimalnya usulan dari Kab/Kota terhadap penegasan batas	Keterbatasan ASN dalam melakukan analisa penegasan batas	Belum maksimalnya penyelesaian batas daerah Kab/Kota dalam meningkatkan tertib administrasi pemerintahan
7	Pembinaan dan penilaian Kecamatan Terbaik	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Peraturan Perundang-undangan tentang Kecamatan	Belum optimalnya kecamatan di Kab/Kota menerapkan pelayanan yang berkualitas	Belum optimalnya peran camat dalam meningkatkan pelayanan publik	Belum tercapainya pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat
8	Penyelesaian permasalahan sengketa/kasus pertanahan	Masih terdapatnya sengketa pertanahan pada masyarakat /swasta/ pemerintah di Kab/Kota	Peraturan perundangan-undangan tentang penyelesaian pengaduan di masyarakat	Belum optimalnya fasilitas yang disediakan disebabkan permasalahan berada di daerah	Kurang SDM ASN dalam memahami permasalahan pertanahan	Kurang optimalnya koordinasi dalam penyelesaian pertanahan dengan instansi yang terkait

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Sesuai kedudukan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU, maka dalam realisasi program dan kegiatan-kegiatan di masing-masing bagian masih ditemui adanya beberapa permasalahan atau isu-isu penting yang timbul dan memerlukan penanganan lebih lanjut antara lain:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara bertugas menyelenggarakan pembinaan sekaligus perumus kebijakan Gubernur Sumatera Utara dalam meningkatkan mutu di bidang pendidikan, sosial dan kesehatan untuk menjadi dasar strategi bagi pelaku teknis dalam penerapannya. Selain sebagai penyelenggara pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan penyusunan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar juga sebagai penyelenggara pengkajian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, sosial serta peningkatan kualitas kesehatan di Sumatera Utara. Tugas lain yang tidak kalah pentingnya bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar sebagai penyelenggara pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian kebijakan penyelenggaraan pendidikan sosial peningkatan kualitas kesehatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu salah satu pilarnya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang diarahkan tidak hanya sebatas peningkatan indeks pembangunan manusia Sumatera Utara tetapi juga kepada peningkatan kemandirian bekerja, membudayakan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi serta pematangan psikis dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor kritis dalam bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dalam mencapai keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia ialah pengadaan guru-guru bermutu (mencapai kualifikasi S-1) yang semakin mencukupi khususnya untuk sekolah lanjutan tingkat atas, perbaikan gedung-gedung sekolah serta pengadaan kebutuhan sekolah maupun pembangunan laboratorium. Kebijakan pembangunan bidang kesehatan ditujukan terutama peningkatan derajat masyarakat yang diarahkan untuk kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehingga masyarakat memiliki ketahanan kesehatan melalui tindakan preventif.
 - a. Di Sub Bidang sosial dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peringatan hari – hari besar nasional dan Pemilihan Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat

(PSM) dan Karang Taruna Teladan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana juga dalam Rencana Strategis di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama 5 (lima) tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM).

- b. Di bidang kesehatan dilakukan melalui kegiatan perlombaan, terhadap pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat sekolah, perusahaan, rumah sakit dan kecamatan sebagaimana Prioritas Pembangunan Kesehatan pada fokus prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dimana antara lain adalah peningkatan kesehatan ibu, bayi dan Keluarga Berencana (KB) dan pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
 - c. Dibidang keagamaan dilakukan melalui peringatan hari-hari besar keagamaan dan peningkatan permohonan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan, peningkatan pelayanan dan kerukunan beragama sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 tahun 2006.
2. Program Nawacita
- a. Pengembangan Pariwisata dan Pembangunan Industri (14 Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus)
 - b. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Perbatasan
 - c. Pembangunan Kemaritiman
 - d. Kedaulatan Pangan
 - e. Kesehatan
 - f. Pendidikan
 - g. Kedaulatan Energi
 - h. Revolusi Mental

C. Biro Hukum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Biro Hukum SetdaprovSU sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya

manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 adalah:

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dari rumusan visi ini diharapkan tercipta masyarakat Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat disegala aspek kehidupan sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi yang begitu dinamis dan perkembangan yang begitu pesat baik dibidang ekonomi, sosial politik, budaya maupun aspek kehidupan lainnya sehingga pada suatu saat nanti terwujud masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023 guna melaksanakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu terdapat pada Misi Ke-2 yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya hukum tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Dari pernyataan visi tersebut diharapkan mampu menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Capaian Nasional, Biro Hukum SetdaprovSU menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;
2. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah belum optimal;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
5. Belum maksimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Masih rendahnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Belum maksimalnya penyuluhan Hukum;
8. Belum terlaksananya dengan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Hukum SetdaprovSU dirumuskan melalui Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Adapun strategi Biro Hukum SetdaprovSU untuk menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam memberdayakan pegawai.
2. Menumbuhkan komitmen bersama dalam konsistensi tindakan pada setiap pelaksanaan tugas.

3. Pengelolaan data-data penting secara lebih akurat untuk penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan kinerja serta penyusunan bahan monitoring dan evaluasi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum untuk pelaksanaan perencanaan dalam melakukan pengkajian ulang produk hukum daerah.
5. Peningkatan koordinasi atas pelanggaran HAM dikalangan aparat penegak hukum, lembaga sosial dan Perguruan Tinggi.
6. Proses perancangan, perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melibatkan kajian akademis dari kalangan Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial dan Asosiasi sehingga proses penerbitan Perda dapat diterima masyarakat.
7. Perlu adanya peningkatan peranan Panitia Ranham Provinsi Sumatera Utara untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan bekerjasama instansi aparat penegak hukum.
8. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu koordinasi yang berkelanjutan dengan instansi penegak hukum sebagai Korwas (Koordinator Pengawas) dan Pembina PPNS di daerah sehingga dapat meningkatkan peranan PPNS yang lebih profesional.
9. Diperlukan Peningkatan dan pengembangan metode teknis penyuluhan hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
10. Peningkatan sosialisasi Produk Hukum Daerah sebagai upaya pelayanan informasi kepada masyarakat dan aparat.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
12. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu.
13. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
14. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pembangunan.
15. Pengembangan sumberdaya aparat untuk meningkatkan skil dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
16. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas.

17. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan.
18. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran.
19. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

D. Biro Perekonomian

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, jika hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang pula.

Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setdaprovsu adalah:

1. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah daerah dalam mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Daerah yang tinggi dan berkualitas.
2. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BUMD/BLUD untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
4. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga kurang tepat waktu.

Sedangkan untuk tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yaitu:

1. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja Biro Perekonomian Setdaprovsu adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi yang sangat cepat.

- d. Tugas dan fungsi yang memiliki cakupan luas.
 - e. Adanya sarana dan prasarana Biro Perekonomian SetdaprovSU.
 - f. Adanya anggaran yang cukup menunjang kinerja Biro Perekonomian SetdaprovSU.
 - g. Masih adanya motivasi pegawai Biro Perekonomian dalam hal pencapaian kinerja
2. Ancaman/Tantangan (*Threat*)

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Biro Perekonomian yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan di bidang penganggaran.
- b. Peningkatan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dalam peningkatan kinerja.
- c. Pemanfaatan aplikasi program komputer dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran, penyusunan program kerja dan pelaporan keuangan serta pendataan aset.
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarannya.
- e. Penyajian data dan informasi yang belum optimal dan akurat.
- f. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi.

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya. Salah satu isu strategis adalah kurangnya mata pencaharian yang menyenangkan serta stabilitas harga-harga yang belum terjangkau dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian. Dengan demikian, setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU bisa ditingkatkan dalam kurun lima tahun ke depan, yaitu:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya.
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional.
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

F. Biro Administrasi Pembangunan

Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021 sudah terbit tepat waktu sebelum masuk TA. 2021, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan APBD Provsu TA. 2021.
2. Pengembangan aplikasi P2Sumut untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan yang sudah dimulai di awal tahun 2021 dan dirubah menjadi aplikasi PRP2SUMUT.
3. Semakin meningkatnya pengawasan dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Semakin minimnya tingkat risiko penyimpangan anggaran, berdasarkan hasil audit Inspektorat Provsu dengan predikat sangat baik atas penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dari Tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya pada akhir Desember 2021.

5. Pembantu usaha kecil menengah melalui Dekranasda dan OPD terkait dalam mempromosikan barang usahanya, terbukti dari beberapa UKM binaan OPD Pemprovsu yang sudah mampu berdiri sendiri untuk mengembangkan usahanya setelah mengikuti pameran/*Expo*.
6. Penyampaian pengendalian laporan fisik pada aplikasi PRP2SUMUT.
7. Penyampaian pengendalian laporan keuangan dan fisik APBD pada aplikasi PRP2SUMUT.
8. Penyampaian pengendalian laporan keuangan dan fisik APBN pada aplikasi PRP2SUMUT.
9. Kawal RPJMD pada Aplikasi PRP2SUMUT.
10. Monitoring pengendalian pembangunan APBD Sumatera Utara Pemerintah Kab/Kota.
11. Pengendalian Pembangunan APBN Sumatera Utara Pemerintah Kab/Kota.
12. Rumusan capaian kinerja pembangunan daerah dan penyiapan bahan kebijakan pembangunan daerah.
13. FGD bertujuan untuk pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumut agar pengendalian pelaksanaan pembangunan kegiatan APBD Kabupaten dan Kota secara pelaporan dapat dikejar target realisasinya, dengan adanya FGD ini dapat membantu tugas-tugas pengendalian dibidang pembangunan dapat berfungsi sesuai Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Sekretariat.

G. Biro Organisasi

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu adalah:

1. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan nilai pelaporan kinerja sesuai kriteria pelaporan kinerja yang baik;
3. Melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan di Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat; dan

5. Melaksanakan penyusunan IKM secara berkesinambungan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

H. Biro Umum

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Biro Umum Setdaprovsu, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Salah satu isu strategis dalam tata pemerintahan ialah aktualisasi *good governance dan clean government*. Penerapan *good governance* (tata pemerintahan yang bersih), tidak dapat dilepaskan dari peran-peran pemerintah, peran masyarakat sipil, dan peran swasta. Dengan demikian maka penerapan *good governance dan clean government* tidak dapat dilepaskan dari SDM pemerintah yang berarti kesadaran, kemauan, dan kemampuan para pelaksana akan memberikan pengaruh terhadap penerapan *good governance dan clean government*.

Dengan demikian, setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Umum Setdaprovsu bisa ditingkatkan dalam kurun lima tahun ke depan, yaitu:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya.
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional.
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Biro Umum Setdaprovsu, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat

dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

I. Biro Administrasi Pimpinan

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pimpinan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU, antara lain:

a. *Overlapping* Eksternal

Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, Badan dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan urusan perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah serta materi dan komunikasi Pimpinan.

b. Perubahan Fungsi

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU mendapatkan tambahan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah yang selama ini menjadi urusan OPD lain.

Kemudian dalam Pergub tersebut ditekankan untuk melakukan fasilitasi dan pelayanan kegiatan Pimpinan dalam hal penyediaan bahan materi dan paparan serta membangun komunikasi Pimpinan, maka diperlukan wadah untuk memfasilitasi dan pelaksanaan fungsi tersebut.

c. Anggaran

Alokasi anggaran yang dimiliki Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU saat ini perlu dimanfaatkan lebih efisien agar dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk lebih mengoptimalkan kembali tugas pokok dan fungsi kiranya perlu dialokasikan penambahan anggaran agar pelayanan informasi dan publikasi dapat dilaksanakan secara maksimal.

d. Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, tentunya Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU perlu melakukan penataan dan penguatan organisasi, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Penataan dan penguatan ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan OPD, lembaga/instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Penyusunan rencana kerja Biro Pemerintahan SetdaprovSU 2021 telah meriview rancangan awal RKPD Tahun 2021, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan.

Rencana Kerja 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU telah mengusulkan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan SetdaprovSU dengan usulan sebesar Rp. 10.762.831.359, - (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap kegiatan dan program.

Pada rancangan awal RKPD untuk TA. 2022, mengusulkan 2 (dua) program yang mendukung tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Setdaprovsu. Penjelasan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel 29 berikut ini.

TABEL 29
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	butuhanDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG				10,762,831,359	BELANJA LANGSUNG				10,802,831,359	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sumatera Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,458,304,933	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sumatera Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,498,304,933	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	76,750,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	116,750,000	
1).	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Terlaksananya Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	18 buku	40,000,000	Penyusunan Renstradan Renja PerangkatDaerah	Sumatera Utara	Terlaksananya Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	18 buku	40,000,000	
2).	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Terlaksananya Penyusunan Renja Perangkat Daerah	16 buku	36,750,000		Sumatera Utara	Terlaksananya Penyusunan Renja Perangkat Daerah	16 buku	36,750,000	
2	Administrasi Keuangan perangkatDaerah	Sumatera Utara	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	13,400,000	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Sumatera Utara	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	13,400,000	
1).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Sumatera Utara	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	13,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Sumatera Utara	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	13,400,000	
3	Administrasi Umum perangkat Daerah	Sumatera Utara	Teenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	591,420,766	Administrasi Umum perangkatDaerah	Sumatera Utara	Teenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	591,420,766	
1).	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Teenuhinya Jumlah Peralatan dan PerlengkapanKantor	100%	97,695,000	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Teenuhinya Jumlah Peralatan dan PerlengkapanKantor	100%	97,695,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2).	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	213,223,766	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Teenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	213,223,766	
		Sumatera Utara	Terselenggaranya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Biro	100%	185,202,000		Sumatera Utara	Terselenggaranya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Biro	100%	185,202,000	
3).	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Terselenggaranya Cetak dan Penggandaan surat-surat	100%	95,300,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Terselenggaranya Cetak dan Penggandaan surat-surat	100%	95,300,000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,486,464,167	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	
1).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Terselenggaranya Jasa Surat Masuk dan Keluar	100%	22,690,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Terselenggaranya Jasa Surat Masuk dan Keluar	100%	22,690,000	
2).	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Teenuhinya Peralatan Gedung Kantor Biro	100%	204,485,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Teenuhinya Peralatan Gedung Kantor Biro	100%	204,485,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	100%	551,445,167	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	100%	551,445,167	
		Sumatera Utara	Teenuhinya Penyediaan Jasa bagi Pelatihan, Pengurus dan Pemain Korsik Marching Band	100%	707,844,000		Sumatera Utara	Teenuhinya Penyediaan Jasa bagi Pelatihan, Pengurus dan Pemain Korsik Marching Band	100%	707,844,000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	290,270,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	290,270,000	
1).	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor	100%	290,270,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor	100%	290,270,000	
B.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100%	8,304,526,426	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100%	8,304,526,426	
1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Terlaksananya Dokumen Tugas Pemerintahan	100%	4,679,399,276	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Terlaksananya Dokumen Tugas Pemerintahan	100%	4,679,399,276	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1).	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Terlaksananya penataan wilayah perbatasan kab/kota dan Provinsi	33 Kab/Kota	640,186,643	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Terlaksananya penataan wilayah perbatasan kab/kota dan Provinsi	33 Kab/Kota	640,186,643	
		Sumatera Utara	Terlaksananya pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tapal batas di kab/kota Provinsi dan diluar provsu	50 Unit	733,069,317		Sumatera Utara	Terlaksananya pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tapal batas di kab/kota Provinsi dan diluar provsu	50 Unit	733,069,317	
		Sumatera Utara	Terlaksananya penataan batas provinsi Sumatera Utara dengan Aceh	1 Provinsi, 9 kab/kota	200,000,000		Sumatera Utara	Terlaksananya penataan batas provinsi Sumatera Utara dengan Aceh	1 Provinsi, 9 kab/kota	200,000,000	
		Sumatera Utara	Terlaksananya Penataan Pemutahiran dan Verifikasi Pembakuan nama-nama Rupa Bumi dan Toponimi	99 Orang	303,805,399		Sumatera Utara	Terlaksananya Penataan Pemutahiran dan Verifikasi Pembakuan nama-nama Rupa Bumi dan Toponimi	99 Orang	303,805,399	
		Sumatera Utara	Terlaksananya Pemutahiran dan Verifikasi penyusunan data wilayah dan kode wilayah administrasi pemerintahan kab/kota	33 Kab/Kota	298,562,328		Sumatera Utara	Terlaksananya Pemutahiran dan Verifikasi penyusunan data wilayah dan kode wilayah administrasi pemerintahan kab/kota	33 Kab/Kota	298,562,328	
2).	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kecamatan	132 org	724,493,319	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kecamatan	132 org	724,493,319	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Sumatera Utara	Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik kab/kota	33 kab/kota	974,999,270		Sumatera Utara	Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik kab/kota	33 kab/kota	974,999,270		
		Sumatera Utara	Terlaksananya Fasilitas Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	33 kab/kota	300,000,000		Sumatera Utara	Terlaksananya Fasilitas Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	33 kab/kota	300,000,000		
	3).	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	504,283,000		Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	504,283,000		
	2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	100%	2,648,440,500		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	100%	2,648,440,500		
	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - frekuensi rapat APPSI yang - jumlah DPRD kab/kota yang mengikuti bimtek tugas anggota dewan, - jumlah DPRD provinsi dan kab/kota yang diproses PAW nya - jumlah KDH dan WKDH yang dilantik 	10 kali, 207 orang dan 23 kepala daerah	1,265,003,250	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - frekuensi rapat APPSI yang - jumlah DPRD kab/kota yang mengikuti bimtek tugas anggota dewan, - jumlah DPRD provinsi dan kab/kota yang diproses PAW nya - jumlah KDH dan WKDH yang dilantik 	10 kali, 207 orang dan 23 kepala daerah	1,265,003,250	

	2	Pengembangan Otonomi dan Pentaan Urusan	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - frekuensi pelaksanaan peringatan hari otonomidaerah - frekuensi pelaksanaan sosialisasi penerapan SPM di provinsi dan kab/kota - jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM di provinsi dan kab/kota 	1 kali, 1 kali dan 1 Dokumen	138,839,500	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - frekuensi pelaksanaan peringatan hari otonomi daerah - frekuensi pelaksanaan sosialisasi penerapan SPM di provinsi dan kab/kota - jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM di provinsi dan kab/kota 	1 kali, 1 kali dan 1 Dokumen	138,839,500	Kegiatan Baru
--	---	---	--------------------------	--	------------------------------	-------------	--	--------------------------	---	------------------------------	-------------	---------------

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah dokumen ringkasan LPPD yang disusun - jumlah LKPJ gubsu yang tersusun - nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 	1 Dokumen, 1 laporan, 2,8 skor	1,244,597,750	evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah dokumen ringkasan LPPD yang disusun - jumlah LKPJ gubsu yang tersusun - nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 	1 Dokumen, 1 laporan, 2,8 skor	1,244,597,750	Kegiatan Baru
3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Provsu dan Luar Provinsi	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	976,686,650	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Provsu dan Luar Provinsi	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	976,686,650	

1	Fasilitasi Kerjasamaantar Pemerintah	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - persentase kerjasama dengan pemerintah yang ditindaklanjuti - persentase kunjungan tamu asing yang difasilitasi dan dikoordinasikan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 persen - 100 persen 	391,315,000	Fasilitasi Kerjasamaantar Pemerintah	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - persentase kerjasama dengan pemerintah yang ditindaklanjuti - persentase kunjungan tamu asing yang difasilitasi dan dikoordinasikan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 persen - 100 persen 	391,315,000	Kegiatan Baru
2	Fasilitasi KerjasamaBadan Usaha/Swasta	Provsu dan Luar Provinsi	persentase Kerjasama dengan badan / usaha yang ditindaklanjuti	100 persen	286,992,000	Fasilitasi KerjasamaBadan Usaha/Swasta	Provsu dan Luar Provinsi	persentase Kerjasama dengan badan / usaha yang ditindaklanjuti	100 persen	286,992,000	Kegiatan Baru
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - frekuensi rapat di sekretariat bersama provsu - jumlah dokumen hasil evaluasi dan monitoring yang tersusun terkait pelaksanaan kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 kali - 1 dokumen 	298,379,650	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Provsu dan Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - frekuensi rapat di sekretariat bersama provsu - jumlah dokumen hasil evaluasi dan monitoring yang tersusun terkait pelaksanaan kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 kali - 1 dokumen 	298,379,650	Kegiatan Baru

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Pada penetapan RKPD Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.301.590.895.120,- (tiga ratus satu milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima serratus dua puluh rupiah) dengan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang di setujui, selanjutnya pada awal penetapan APBD Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu memperoleh alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 423.980.174.791, - (Empat ratus dua puluh tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh serratus tujuh puluh empat tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi serta strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Mengingat munculnya isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan. program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA 2022 terhadap perubahan yang mengakibatkan adanya penambahan kegiatan, indikator, target dan pendanaanya tersebut ini adalah merupakan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan oleh Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu pada tahun 2020.

C. Biro Hukum

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, memuat program dan kegiatan seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing OPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, maka penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2022 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang

diperuntukkan bagi Biro Hukum Setdaprovsu setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Hukum Setdaprovsu.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu, program dan kegiatan prioritas tahun 2022, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenkatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Hukum Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Usulan program dan kegiatan dari Biro Hukum Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Hukum Setdaprovsu.

Dalam Tabel 30 dapat dilihat program dan kegiatan pada Biro Hukum Setdaprovsu yang telah tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan analisa kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

TABEL 30
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA UTARA BIRO HUKUM SETDAPROVSU

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4,997,000,000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4,997,000,000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,989,257,100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,989,257,100	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				152,040,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				152,040,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah pelaksanaan penatausahaan OPD	11 orang	152,040,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah pelaksanaan penatausahaan OPD	11 orang	152,040,000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				573,615,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				573,615,000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 orang	444,541,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 orang	444,541,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	100 orang	129,074,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	100 orang	129,074,000	
3	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah				873,071,500	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah				873,071,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	48 jenis dan 1000 kotak	152,395,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	48 jenis dan 1000 kotak	152,395,600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy	200000 lembar	20,840,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy	200000 lembar	20,840,900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	1460 eksaminasi	9,855,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	1460 eksaminasi	9,855,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	80 kali	689,980,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	80 kali	689,980,000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				379,430,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				379,430,600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Pengiriman surat/paket	500 surst	3,550,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Pengiriman surat/paket	500 surst	3,550,000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24 unit	208,015,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24 unit	208,015,000	
	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	5 orang	167,865,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	5 orang	167,865,600	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11,100,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11,100,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	100 unit	11,100,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	100 unit	11,100,000	
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				3,007,742,900	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				3,007,742,900	
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan				1,026,958,900	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan				1,026,958,900	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam dan di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	10 Ranperda , 2 orang, 40 dokumen	344,910,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam dan di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	10 Ranperda , 2 orang, 40 dokumen	344,910,000	

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	740 dokumen	100,693,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	740 dokumen	100,693,000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	2 dokumen , 10 JDIH	210,763,400	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	2 dokumen , 10 JDIH	210,763,400	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	400 dokumen	370,592,500	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	400 dokumen	370,592,500	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum				1,980,784,000	Fasilitasi Bantuan Hukum				1,980,784,000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan dan Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	5 kasus, 20 perkara	566,730,000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan dan Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	5 kasus, 20 perkara	566,730,000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM dan Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	68 dokumen , 24 kasus	1,414,054,000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum SetdaprovSU	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM dan Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	68 dokumen , 24 kasus	1,414,054,000	
					4,997,000,000					4,997,000,000	

D. Biro Perekonomian

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Biro Perekonomian SetdaprovSU

NO		PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Output	Rancangan Awal		Indikator Output	Hasil Analisis Kebutuhan	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	1.350.000.000	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	1.350.000.000
	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	12 bulan	500.000.000	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	12 bulan	500.000.000
	2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi	30 orang	50.000.000	Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi	30 orang	50.000.000
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Adminsitasi Umum Biro Perekonomian	12 bulan	700.000.000	Terlaksananya Kegiatan Adminsitasi Umum Biro Perekonomian	12 bulan	700.000.000
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	50.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	50.000.000
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara secara rutin	16 unit	50.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara secara rutin	16 unit	50.000.000
II		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	2.800.000.000	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	2.800.000.000

1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah kesesuaian pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	1.000.000.000	Jumlah kesesuaian pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	1.000.000.000
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan yang dilaksanakan	3 dokumen	900.000.000	Jumlah kebijakan yang dilaksanakan	3 dokumen	900.000.000
3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah kesesuaian kebijakan BUMD dan BLUD	3 dokumen	900.000.000	Jumlah kesesuaian kebijakan BUMD dan BLUD	3 dokumen	900.000.000
TOTAL				4.150.000.000			4.150.000.000

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, memuat program dan kegiatan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing OPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, maka penyusunan Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu Tahun 2022 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang diperuntukkan bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu, program dan kegiatan prioritas tahun 2022, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenkatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Usulan program dan kegiatan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 32

Rancangan Awal Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU											Catatan Penting
RENCANA AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Prog/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	<u>Program:</u> Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	100%	4.558.491.362	Program Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Persentase Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	100%	4.558.491.362	
I.	Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan	100%	1.418.045.606	Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia	100%	1.418.045.606	

			profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri					pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri			
	<u>Sub Kegiatan:</u> Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/ Kota	264.027.056	<u>Sub Kegiatan:</u> Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	264.027.056	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berkualitas dan berkompeten	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/ Kota	365.660.300	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berkualitas dan berkompeten	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	365.660.300	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terdampingnya SDM dalam konsultasi dan terasilitasnya SDM dalam Bimbingan Teknis	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/ Kota	788.358.250	Pendampingan , Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan	Sumut	Terdampingnya SDM dalam konsultasi dan terasilitasnya SDM dalam Bimbingan Teknis	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	788.358.250	

						Jasa					
II.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sumut	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100%	1.373.589.056	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sumut		100%	1.373.589.056	
	<u>Sub Kegiatan:</u> Pengelolaan Sistem Pengadaan secara	Sumut	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	205.597.056	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara	Sumut	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	205.597.056	

	Elektronik		Kredibel secara Elektronik			Elektronik		Kredibel secara Elektronik			
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Pengembangan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dapat menyentuh semua kalangan yang berkompeten terhadap Pengadaan Barang dan Jasa	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/ Kota	846.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Pengembangan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dapat menyentuh semua kalangan yang berkompeten terhadap Pengadaan Barang dan Jasa	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	846.000.000	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terkelolanya informasi Pengadaan Barang dan Jasa secara transparan dan kredibel	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	321.992.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terkelolanya informasi Pengadaan Barang dan Jasa secara transparan dan kredibel	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	321.992.000	
III.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan	100%	1.766.856.700	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut		100%	1.766.856.700	

			sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri								
	<u>Sub Kegiatan:</u> Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya standart yg proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018 dan Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	857.136.352	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya standart yg proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018 dan Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	857.136.352	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya operasional layanan pengadaan di Provsu	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	606.370.348	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya operasional layanan pengadaan di Provsu	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	606.370.348	
	- Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	303.350.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel	49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota	303.350.000	
B	<u>Program :</u> Program Penunjang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	618.762.638	Program Program	Sumut	Persentase Program Kebijakan dan	100%	618.762.638	

	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Daerah Provinsi			Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa			
I.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumut	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial dan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi	100%	122.503.200	Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial dan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi	100%	122.503.200	
	<u>Sub Kegiatan:</u>	Sumut	Tersusun dan	Operasion	122.503.200	Pengelolaan	Sumut	Tersusun dan	Operasion	122.503.200	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Tercetaknya RKA dan DPA	al Biro Pengadaan Barang dan Jasa		Sistem Pengadaan secara Elektronik		Tercetaknya RKA dan DPA	al Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumut	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial dan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi	100%	457.605.438	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sumut		100%	457.605.438	

	<u>Sub Kegiatan:</u> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumut	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	154.539.438	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	154.539.438	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumut	Tersedianya Pengadaan Barang dan cetakan	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	41.300.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Tersedianya Pengadaan Barang dan cetakan	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	41.300.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumut	Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	51.326.000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	51.326.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Sumut	Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan di Dalam Daerah dan Luar Provsu	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	210.440.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan di Dalam Daerah dan Luar Provsu	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	210.440.000	
III.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumut	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik	100%	39.400.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut		100%	39.400.000	

			yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial dan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dan Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi								
	<u>Sub Kegiatan:</u> - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumut	Pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	39.400.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumut	Pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa	39.400.000	
JUMLAH					5.178.000.000	JUMLAH					5.178.000.000

F. Biro Administrasi Pembangunan

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dan tingkat kinerja yang dicapai terkait program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang disediakan untuk Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU.

Tabel 33
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Prog/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Prog/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				650.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				650.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administiras	100 %	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administiras	100 %	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administiras	100 %	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administiras	100 %	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase pemenuhan layanan administiras	100 %	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase pemenuhan layanan administiras	100 %	200.000.000	

		Kelurahan					Kelurahan				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administras	100 %	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administras	100 %	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administras	100 %	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan layanan administras	100 %	200.000.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				7.513.460.000	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				7.513.460.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	843.460.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	843.460.000	

	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	600.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	600.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	1.900.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	1.900.000.000	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk	100 %	2.300.000.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis	100 %	2.300.000.000	

			mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat					dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat			
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	1.400.000.000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	1.400.000.000		
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	470.000.000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat	100 %	470.000.000		

G. Biro Organisasi

Pada rancangan awal RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.970.000.000,-. Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam RKA sebesar Rp. 5.280.041.602,-. Dari jumlah RKA Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam DPA Biro Organisasi Setdaprovsu sebesar Rp. Rp 5.280.041.602,-. Dengan adanya ketersediaan dana untuk tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari rancangan awal.

Rancangan awal RKPD untuk TA. 2021 dengan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu adalah sebesar Rp.6.113.186.046,-. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 disajikan dengan Tabel 34 (T-C 31) berikut ini.

TABEL 34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

No.			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SEKRETARIAT DAERAH					6,587,870,350				7,164,493,490
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2,189,470,350				2,408,753,490
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44,000,000				48,400,000
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan	Biro Organisasi	6 dokumen	44,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	6 dokumen	48,400,000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				550,000,000				605,000,000
		01 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola administrasi perkantoran dan keuangan	Biro Organisasi	21 orang	550,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	21 orang	605,000,000
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Biro Organisasi		125,000,000				137,500,000
		01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat dan dinyatakan lulus	Biro Organisasi	12 Orang	125,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	15 Orang	137,500,000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,327,714,850				1,460,486,335
		01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Biro Organisasi	725 buah	88,550,000	APBD PROVSU	Lanjutan	725 buah	97,405,000

	02	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Biro Organisasi	223.496 lbr	203,500,000	APBD PROVSU	Lanjutan	223.496 lbr	223,850,000
	03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pegawai dan tamu dari unit kerja lain yang difasilitasi	Biro Organisasi	400 org	63,815,950	APBD PROVSU	Lanjutan	400 org	70,197,545
	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat kordinasi dan kunsultasi	Biro Organisasi	30 orang	971,848,900	APBD PROVSU	Lanjutan	35 orang	1,069,033,790
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	110,000,000			100%	121,000,000
	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Biro Organisasi	4 unit	110,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	4 unit	121,000,000
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,055,500				3,697,155
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan materi yang tersedia	Biro Organisasi	323 dokumen	3,055,500	APBD PROVSU	Lanjutan	323 dokumen	3,697,155
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29,700,000.00				32,670,000
	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki dan dipelihara.	Biro Organisasi	20 unit	29,700,000	APBD PROVSU	Lanjutan	20 unit	32,670,000
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses			4,398,400,000				4,755,740,000
	1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penataan Kelembagaan dan Anjab ABK		100 persen	1,540,000,000			100 persen	1,611,500,000
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah draft Perda dan Pergub hasil penataan dan evaluasi kelembagaan provinsi yang terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan	Sumatera Utara	10 draf pergub	660,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	100 persen	698,500,000
	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	Sumatera Utara	33 rekomendasi	440,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	33 rekomendasi	456,500,000

	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah jabatan yang disusun Anjab ABK dan divalidasi	Sumatera Utara	9327 jabatan	440,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	9327 jabatan	456,500,000
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas		100 persen	2,858,400,000			100 persen	3,144,240,000
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah provinsi dan Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan RB	Sumatera Utara	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	635,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	698,500,000
	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah perangkat daerah provinsi dan Kab/Kota yang dimonitoring	Sumatera Utara	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	440,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	484,000,000
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah perangkat daerah provinsi dan Kab/Kota yang dievaluasi	Sumatera Utara	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	440,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	484,000,000
	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah kebijakan di bidang Ketatalaksanaan yang dikelola	Sumatera Utara	6 Dokumen	745,000,000	APBD PROVSU	Lanjutan	6 Dokumen	819,500,000
	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik	Sumatera Utara	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	598,400,000	APBD PROVSU	Lanjutan	49 PD Provinsi dan 33 Kab/Kota	658,240,000

H. Biro Umum

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, memuat program dan kegiatan seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing OPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, maka penyusunan Renja Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2022 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang diperuntukkan bagi Biro Umum Setdaprovsu setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Umum Setdaprovsu.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Umum Setdaprovsu, program dan kegiatan prioritas tahun 2022, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenkultur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Umum Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Usulan program dan kegiatan dari Biro Umum Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Umum Setdaprovsu.

I. Biro Administrasi Pimpinan

Penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu actual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana Kerja 2022 Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dengan usulan sebesar Rp. 16.444.000.000, -. Yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Pada rancangan awal RKPD untuk tahun anggaran 2022, mengusulkan 1 (satu) program yang mendukung tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu. Penjelasan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Biro Administrasi Pimpinan setdaprovsu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				16,444,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				16,444,000,000	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara			15,750,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara			15,750,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54 Dokumen	5,250,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54 Dokumen	5,250,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	50 Eksemplar	10,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	50 Eksemplar	10,500,000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara			2,083,010,780	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara			2,083,010,780	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	1 Tahun	2,083,010,780	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	1 Tahun	2,083,010,780	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara			913,379,055	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara			913,379,055	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	804,179,055	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	804,179,055	

	Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	109,200,000	Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	109,200,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara			4,871,344,565	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara			4,871,344,565	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Unit	114,773,712	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Unit	114,773,712	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Jenis	795,341,190	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Jenis	795,341,190	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Jenis	163,212,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Jenis	163,212,800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	51 Jenis	394,050,032	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	51 Jenis	394,050,032	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1000 kali	2,222,875,111	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1000 kali	2,222,875,111	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	245 Kali	1,181,091,720	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	245 Kali	1,181,091,720	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD		13,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD		13,000,000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara		260 Kali	13,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara		260 Kali	13,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		267,254,800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		267,254,800	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara		10 Unit	267,254,800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara		10 Unit	267,254,800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1,604,216,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1,604,216,000	

7	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara		100%	258,330,000	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara		100%	258,330,000	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	100%	1,025,000,000	Penyiapan Materi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	100%	1,025,000,000	
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	320,886,000	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	320,886,000	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		6,676,044,800	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		6,676,044,800	
8	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Sumatera Utara		100%	1,048,644,800	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Sumatera Utara		100%	1,048,644,800	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	650 Kali	2,900,000,000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	650 Kali	2,900,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	2,727,400,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	2,727,400,000	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%	2,727,400,000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%	2,727,400,000	

2.4. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam mendukung program dan kegiatan ini menampung usulan kegiatan masyarakat halini telah dianalisa sesuai kebutuhan program dan kegiatan untuk TA 2021 yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Usulan dari masing-masing bagian di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditelaah sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang menjadi prioritas dalam mendukung tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, dengan melihat isu-isu penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga, aparatur pemerintah daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota maupun aparatur Provinsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sehingga terciptanya birokrasi yang bersih dan kuat sesuai dengan *Good Government* dan *Clean Government*.
- b. Melakukan pembinaan, penataan serta pengawasan terhadap batas wilayah baik batas antar Kabupaten/Kota serta batas antar Provinsi dengan Provinsi diluar Provinsi Sumatera Utara dan batas antar negara sehingga terciptannya penataan administrasi kewilayahan dengan baik sesuai dengan aturan dan peraturan.
- c. Melakukan koordinasi dalam meningkatkan motivasi kinerja dengan pemerintah Provinsi diluar Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan teratur.
- d. Melakukan pembinaan dan penataan kepada aparatur pemerintahan daerah yang langsung menangani pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini kecamatan, sehinggadapat terciptanya kualitas pelayanan publik.
- e. Melakukan penataan dan pengawasan terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai oleh pihak swasta maupun masyarakat serta negara, sehingga terciptanya kepemilikan yang sah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan juga memfasilitasi penyelesaian permasalahan/sengketa kepemilikan tanah baik di Pemerintah Kabupaten/Kota maupun di Provinsi.
- f. Melakukan Otonomi Daerah dan memfasilitasi peresmian pengangkatan Bupati, DPRD, Ketua DPRD, penyelenggara Standar Pelayanan Minimal, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- g. Melakukan kerjasama internasional, kerjasama.

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU.

C. Biro Hukum

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum SetdaprovSU. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Biro Hukum SetdaprovSU pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Hukum SetdaprovSU.

D. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi-asosiasi maupun dari OPD kab/kota yang

langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil reses DPRD.

Biro Perekonomian SetdaprovSU pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Perekonomian SetdaprovSU

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.

F. Biro Administrasi Pembangunan

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara

langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

G. Biro Organisasi

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Biro Organisasi Setdaprovsu pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Organisasi Setdaprovsu.

H. Biro Umum

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum Setdaprovsu. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Biro Umum Setdaprovsu pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Umum Setdaprovsu.

I. Biro Administrasi Pimpinan

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU pada Tahun 2022 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk mengembangkan pelayanan publik yang bercirikan *good governance*, tentu banyak aspek yang perlu dibenahi dalam birokrasi. Keadaan sekarang merupakan hasil dari sebuah interaksi yang kompleks dan akumulasi masalah yang telah lama melekat dalam kehidupan birokrasi. Pemikiran selama ini mengilhami perilaku birokrasi aparatur pemerintah sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan perlu diprofesionalkan, sebab pelaku-pelaku inilah nantinya yang melaksanakan aspirasi dan keinginan warga. Aparatur yang profesional nantinya dibekali akan nilai, tradisi, dan misi birokrasi sebagai agen pelayanan.

Strategi dan arah kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merujuk pada pengertian profesionalisme aparatur dan pemahaman kerja yang benar, dimana disadari dan tidak disadari peran masyarakat sebagai subjek dan objek fungsi governing akan semakin kuat, maka perlu pembenahan strategi yang dapat mengimbangi mekanisme pola pikir dan kebutuhan masyarakat (*governance without government*) pergeseran nilai bahwa pemerintah bukan lagi segala-galanya (*omnipotent*) perlu disikapi secara logis. Meskipun perspektif governance mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, namun sebagai institusi sangat menentukan dalam koridor pemberdayaan melalui koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan kolaborasi dengan daerah Kabupaten/Kota.

Konsekuensi logis dan strategis dan arah kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu dalam menyikapi situasi baru tentunya meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi dan akuntabilitas publik terhadap semua pilar governance dengan prinsip-prinsip penentuan formulasi dan evaluasi kebijakan terhadap implementasi kegiatan/program di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu.

Lemahnya tingkat pelayanan dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu dipengaruhi cara menyikapi partisipasi, transparansi, kepastian hukum, konsensus kegiatan secara efektif dan efisien. Kondisi ini dinilai dari mekanisme perumusan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mekanisme kehidupan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etis hidup, peka terhadap kondisi

sosial, politik, dan diharapkan kelak pemerintahan kabupaten/Kota senantiasa berkonsultasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan harmonisasi kebutuhan masyarakat, menjalankan serta mengawasi kegiatan pemerintahan didukung DPRD yang memiliki dedikasi yang tinggi.

Hal yang lain yang merupakan prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu adalah penataan tapal batas antara daerah kabupaten/kota maupun antar provinsi, penerapan sistem informasi, mengidentifikasi kasus-kasus pertanahan di Provinsi Sumatera Utara yang semuanya ini dilakukan untuk mewujudkan tertibnya administrasi pemerintahan.

Pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri yang salah satu program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program pembangunan nasional yakni Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dimana program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

- a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- b. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah;
- c. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
- d. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta
- f. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Dengan melihat Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri dimana ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri juga telah diselaraskan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu merupakan salah satu OPD pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Dan sehubungan dengan telah dikukuhkannya Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pergub No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pergub No. 37 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Bina Masyarakat dan Sosial Setdarovsu menjadi Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu.

Untuk lebih memantapkan pencapaian pembangunan yang berkesinambungan maka perlu diambil kebijakan nasional yang mana arah kebijakan berdasarkan misi yang diemban Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu adalah:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Membina prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan.
3. Memberikan informasi umum tentang sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan.
4. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan.
5. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pengembangan kehidupan sosial masyarakat dan kegiatan keagamaan.

C. Biro Hukum

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan pembangunan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini adalah Bappeda yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk

itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib, Biro Hukum SetdaprovSU melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemerintahan Umum antara lain Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kualitas Aparatur Penegak Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

D. Biro Perekonomian

Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2019-2023 yaitu:

“Sumatera Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- b. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
- c. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- d. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setdapovsu adalah misi pertama yakni:

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau”

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Prioritas Nawacita terdiri dari 9 (sembilan) Agenda yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Bagian Keenam Pasal 59 menyatakan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelayanan proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah, yang dipimpin oleh seorang Kepala

Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelayanan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah;
- b. perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Provinsi Sumatera Utara;
- c. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pembinaan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- e. pelaksanaan faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan, kelancaran dan kepastian pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- f. pelayanan konsultasi, pendampingan dan asistensi pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. pelayanan dan proses penetapan daftar hitam penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. pengelolaan sistem teknologi informasi pengadaan barang/jasa;
- i. pelayanan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
- j. pelaksanaan reviu kerangka acuan kerja, harga perhitungan sendiri dan draft kontrak pengadaan barang/jasa;
- k. penyusunan dan penyampaian saran, masukan dan pertimbangan atas pengadaan barang dan jasa dengan nilai lebih dari 100 miliar yang harus ditetapkan oleh Gubernur;
- l. fasilitasi penginputan barang/jasa ke dalam sistem e- katalog;
- m. fasilitasi konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. pengembangan ahli pengadaan barang/jasa;
- o. fasilitasi bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang/jasa;
- p. penyelenggaraan administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- q. pengelolaan kepegawaian Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- r. pengelolaan keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- s. pengelolaan barang/aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara; dan
- t. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berpegang pada budaya kerja antara lain:

- Mengutamakan profesionalisme, ketelitian, kecermatan, kearifan dan objektivitas dalam bekerja;
- Mengutamakan disiplin dan waktu;
- Berusaha bekerja dalam satuan tim secara efisien, produktif, adaptif dan inovatif;
- Berorientasi kepada hasil kerja yang prima;
- Hemat dalam penggunaan dana, sarana dan prasarana;
- Siap bekerja secara berkualitas sesuai Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

F. Biro Administrasi Pembangunan

Seperti kita ketahui bahwa 9 agenda prioritas – Nawacita adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SetdaprovSU akan berubah menjadi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Bagian Ketujuh Pasal 72 menyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempunyai tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berpegang pada budaya kerja seperti:

- Mengutamakan profesionalisme, ketelitian, kecermatan, kearifan dan objektivitas dalam bekerja;
- Mengutamakan disiplin dan waktu;

- Berusaha bekerja dalam satuan Tim secara efisien, produktif, adaptif dan inovatif;
- Berorientasi kepada hasil kerja yang prima;
- Hemat dalam penggunaan dana, sarana dan prasarana;
- Siap bekerja secara berkualitas.

G. Biro Organisasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN ke -4 (empat) dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan bidang aparatur mengacu kepada arah pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJPN 2005-2025 tahap ke IV yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral dalam bentuk reformasi kelembagaan melalui ASN profesional, berintegritas dan netral, manajemen yang kinerja yang handal, efektif dan akuntabel; organisasi dan proses bisnis birokrasi yang responsif dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke 4, kondisi yang diharapkan pada Tahun 2020-2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Melalui kebijakan pengarusutamaan diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola kinerja. Tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah:

1. Terwujudnya ASN yang profesional;
2. Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas.

Dalam rangka mensinergikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara maka berdasarkan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat disusun hubungan antara kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja yang. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut, maka Biro Organisasi SetdaprovSU melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan mensinergikan pembangunan nasional diantaranya “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Hal ini akan memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah terutama dalam hal Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Akuntabilitas.

Dokumen Rencana Kerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2019–2023 dan RPJMD Tahun 2019-2023 sekaligus terdapat keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada RPJMD dengan kebijakan dan program pada Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2019–2023.

Indikator Kinerja ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) diharapkan agar dari awal perencanaan kegiatan telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sejalan dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

H. Biro Umum

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2018-2023 yaitu :

“Sumatera Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- e. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- f. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
- g. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional
- h. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- i. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Tahun 2018-2023 yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum Setdapovsu adalah Misi ke 2 (Dua) yakni :

“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya Pemerintahan Yang Bersih dan Dicintai, Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Adil, Terpercaya, Politik Yang Beretika, Masyarakat Berwawasan Kebangsaan, dan Memiliki Kohesi Sosial Yang Kuat Serta Harmonis”.

Tujuan dan sasaran misi ke-dua dikukuhkan dalam rumusan strategi *Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)*. Implementasi strategi tersebut yang relevan dengan tugas dan fungsi Biro Umum Setdaprovusu

yakni pada bidang urusan Pemerintahan yaitu *Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta.

Secara umum prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 pada 5 (lima) prioritas utama yakni :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas
5. Peningkatan daya saing melalui sector agraris dan pariwisata.

I. Biro Administrasi Pimpinan

Rencana Kerja yang disusun Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait

5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pencapaian tujuan adalah untuk memberikan kejelasan arah dan langkah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, sehingga akan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat dan pihak swasta sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan sasaran yang akan dicapai yang menjadi fokus penetapan program, kegiatan dan sumber daya organisasi yang menggambarkan pencapaian dan realisasi tujuan yang terukur serta adanya kepastian waktu penyelesaiannya sebagai berikut:

A.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- b. Tujuan jangka menengah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu telah menyelaraskan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 pada poin pertama yakni : “ Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik”.

A.2. Sasaran

Sasaran Rencana Strategi ini sesuai dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Terwujudnya Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada masing-masing bagian di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu telah menyusun tujuan dan

sasaran yang menyangkut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai berikut:

- a. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang lebih adil membuahkan hasil berupa Undang-Undang Pemerintah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga perlu melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sehingga terciptanya kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Penataan wilayah administrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi mempunyai peranan yang sangat penting dimana penataan batas wilayah merupakan perwujudan pelayanan administrasi Pemerintahan bagi masyarakat, sehingga perlu penegasan kewilayahan suatu Daerah Pemerintahan.
- c. Permasalahan pertanahan yang sangat penting dan menjadi perhatian di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dimana penataan sengketa/konflik pertanahan melalui fasilitasi dan rekomendasi yang perlu penegasan sehingga kepastian kepemilikan tanah dapat dimiliki bagi masyarakat/swasta dan pemerintah.

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

B.1. Tujuan dari Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu adalah :

Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, konsep kebijakan Kepala Daerah, serta evaluasi terhadap pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi .dalam pengendalian urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan fasilitasi pengembangan keajahteraan rakyat non pelayanan dasar, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.

B.2. Sasaran Biro Kesejahteraan Setdaprovsu adalah:

1. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga di Provinsi Sumatera Utara.

2. Memantapkan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas bidang kesehatan dan tenaga kerja yang diarahkan pada masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.
3. Memantapkan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin baik dan berkualitas.
4. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan keharmonisan dan kerukunan kehidupan beragama.

C. Biro Hukum

Berdasarkan visi dan misi Biro Hukum Setdaprovsu yang tertuang di dalam Renstra Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2019-2023, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari penjabaran misi, adalah :

MISI I Meningkatkan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan:

Peningkatan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran:

Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI II Meningkatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.

Tujuan:

Peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.

Sasaran:

Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.

MISI III Mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.

Tujuan:

Perwujudan pelayanan prima dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.

Sasaran:

Terwujudnya pelayanan prima dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.

Misi IV Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam hukum melalui pemberian bantuan hukum.

Tujuan:

Perwujudan pelayanan pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.

Sasaran:

Terwujudnya pelayanan pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.

Misi V Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan pelaksanaan RANHAM.

Tujuan:

Peningkatan peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sasaran:

Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Misi VI Meningkatkan penatausahaan administrasi dan kearsipan.

Tujuan:

Peningkatan penatausahaan administrasi dan kearsipan.

Sasaran:

Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.

Misi VII Meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Tujuan:

Peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Misi VIII Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

Tujuan:

Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

Sasaran:

Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

D. Biro Perekonomian

Tujuan dan Sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Biro Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 36

Strategi dan Arah Kebijakan Biro Perekonomian SetdaprovSU

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Tersedianya kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah yang berkualitas	Melakukan pengumpulan bahan dan data terkait kebijakan guna peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah yang berkualitas	Menyelenggarakan rapat-rapat dalam pengumpulan data dan bahan kebijakan
		Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap isu-isu strategis terkait kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatkan koordinasi dengan kab/kota, pemerintah pusat serta OPD terkait
	Peningkatan implementasi kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Menyelenggarakan rapat evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing perekonomian daerah

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara dalam bidang pembangunan khususnya Pengadaan Barang/Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan pelayanan

antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.

2. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah dengan indikator sasaran:

1. Terkoordinirnya dan terfasilitasinya instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah bersumber dana APBD maupun APBN;
3. Tertibnya administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas.
2. Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Melaksanakan pembinaan secara berjenjang dan berkoordinasi terhadap hasil pembinaan tersebut.

Sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dikelola pada tahun 2021 adalah mewujudkan perumusan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibantu :

1. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dibantu :
 - a. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dibantu :
 - a. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi
 - c. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dibantu :
 - a. Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Kepala Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

F. Biro Administrasi Pembangunan

Visi Biro Administrasi Pembangunan adalah “Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel”.

Misi Biro Administrasi Pembangunan adalah :

- 1) Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel dan Transparan melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- 2) Mewujudkan Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menginformasikan serta mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah di dalam maupun luar negeri sebagai upaya pembinaannya.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- b) Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pada point 1 tersebut di atas adalah mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran:

- 1.1. Jumlah Kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam Administrasi Pembangunan
- 1.2. Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi PRP2SUMUT

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas

adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Indikator Sasaran:

- 1.1.1. Terkoordinirnya Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengikuti pelaksanaan Pameran di dalam maupun di luar negeri yang meliputi Pameran, Hasil Pembangunan, Industri, Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, Budaya, Pertanian/Agro serta Potensi Investasi.
- 1.1.2. Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovu menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas.
- ✓ Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola partisipasi dan berkelanjutan.
- ✓ Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut.

Sementara itu, sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan yang dikelola pada tahun 2020 - 2021 terdiri dari:

1. Mewujudkan pelaporan realisasi fisik, keuangan APBD Provus yang efisien

Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu:

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - a.1. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - a.2. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - a.3. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
 - b.1. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I
 - b.2. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II
 - b.3. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III
- c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - c.1. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - c.2. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.
 - c.3. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

G. Biro Organisasi

G.1. Adapun tujuan Biro Organisasi Setdaprovsu adalah :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Berintegritas.

G.2. Sasaran Biro Organisasi Setdaprovsu adalah :

1. Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Penerapan SAKIP yang berbasis kinerja secara optimal pada Organisasi Perangkat Daerah Provsu.

H. Biro Umum

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Umum Setdaprovsu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Umum Setdaprovsu yang ditetapkan adalah meningkatkan fasilitas, penataan dan pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Sasaran

Sasaran dari Biro Umum Setdaprovsu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya fasilitasi pelayanan kegiatan pimpinan daerah.
- b. Meningkatnya pemanfaatan gedung dan Mess Pemprovsu.

I. Biro Administrasi Pimpinan

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Menyediakan dan menyajikan bahan materi dan paparan pimpinan.
- c. Membina hubungan yang harmonis dengan Lembaga/instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan kedinasan Pimpinan dan tamu.
- e. Meningkatnya sumber daya aparatur yang professional kompeten dan akuntabel.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
 - Terkoordinasinya Perencanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA dan DPA Sekretariat Daerah
 - Tersusunnya Pelaporan LPPD, LKPJ, LK, PK, IKU dan IKK Sekretariat Daerah.
 - Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah.
- b. Menyediakan dan menyajikan bahan materi dan paparan Pimpinan.
 - Tersedianya Bahan Materi dan Paparan Pimpinan
 - Terfasilitasi Penyajian Bahan Materi dan Paparan Pimpinan
 - Terdokumentasinya Kegiatan Pimpinan
- c. Membina hubungan yang harmonis dengan Lembaga/instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - Terbangunnya hubungan yang harmonis dengan Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Terbangunnya hubungan yang harmonis dengan Masyarakat dan Swasta
- d. Meningkatkan pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu.

- Terfasilitasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan dalam tata upacara, tata tempat dan tata pelaksanaan kegiatan.
 - Terfasilitasi kebutuhan tamu Pimpinan.
- e. Meningkatnya sumber daya aparatur yang professional kompeten dan akuntable.
- Terpenuhinya Kompetensi sumber daya aparatur dalam menunjang Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi.
 - Tercapainya Jenjang Pendidikan dan pelatihan Strukturan dan Fungsional bagi sumber daya aparatur.

3.3. Program dan Kegiatan

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

A.1. Program.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan teadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.

A.2. Kegiatan Prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU

Adapun Kegiatan Prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2022 adalah sebagaimana berikut ini, yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 2.458.304.933.
- 2) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 8.304.526.426.

Kegiatan indikatif penjabaran Program Kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran, Dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 10.762.831.359,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan

Rupiah) untuk menjalankan Program dan Kegiatan tersebut secara terperinci pada tabel di bawah ini :

TABEL 37
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVSU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG				Rp 11,402,831,359				Rp 12,329,025,960
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	100%	Rp 2,498,304,933	APBD		100%	Rp 2,578,304,933
	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	Rp 116,750,000	APBD	3000 surat	Rp 146,750,000
	1).	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Sumatera Utara	18 buku	Rp -	APBD	18 buku	Rp 30,000,000
			Terlaksananya Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	16 buku	Rp 40,000,000	APBD	16 buku	Rp 40,000,000
	2).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sumatera Utara	3 Dokumen	Rp 36,750,000	APBD	3 Dokumen	Rp 36,750,000
	3).	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sumatera Utara	15 buku	Rp 40,000,000	APBD	15 buku	Rp 40,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 13,400,000	APBD	1 Dokumen	Rp 13,400,000	
1).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 13,400,000	APBD	1 Dokumen	Rp 13,400,000	
3	Administrasi Umum perangkat Daerah	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	Rp 591,420,766	APBD	100%	Rp 591,420,766	
1).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	100%	Rp 97,695,000	APBD	100%	Rp 97,695,000	
2).	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Sumatera Utara	100%	Rp 213,223,766	APBD	100%	Rp 213,223,766	
		Terselenggaranya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Biro	Sumatera Utara	100%	Rp 185,202,000	APBD	100%	Rp 185,202,000	
3).	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Cetak dan Penggandaan surat-surat	Sumatera Utara	100%	Rp 95,300,000	APBD	100%	Rp 95,300,000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	100%	Rp 1,486,464,167	APBD	100%	Rp 1,486,464,167	
1).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Masuk dan Keluar	Sumatera Utara	100%	Rp 22,690,000	APBD	100%	Rp 22,690,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	2).	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Biro	Sumatera Utara	100%	Rp 204,485,000	APBD		100%	Rp 204,485,000
	3).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan AdministrasiKeuangan	Sumatera Utara	100%	Rp 551,445,167	APBD		100%	Rp 551,445,167
			Terpenuhinya Penyediaan Jasa bagi Pelatihan,Pengurus dan Pemain Korskik Marching Band	Sumatera Utara	100%	Rp 707,844,000	APBD		100%	Rp 707,844,000
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	100%	Rp 290,270,000	APBD		100%	Rp 340,270,000
	1).	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	100%	Rp 290,270,000	APBD		100%	Rp 340,270,000
B.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawabdan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Sumatera Utara	100%	Rp 8,904,526,426	APBD		100%	Rp 9,750,721,027
	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya Dokumen TugasPemerintahan	Sumatera Utara	100%	Rp 4,679,399,276	APBD		100%	Rp 4,925,593,877
	1).	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya penataan wilayah perbatasan kab/kotadan Provinsi	Sumatera Utara	33 Kab/Kota	Rp 640,186,643	APBD		33 Kab/Kota	Rp 640,186,643

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		Terlaksananya pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tapal batas di kab/kota Provinsi dan diluar provsu	Sumatera Utara	50 Unit	Rp 733,069,317	APBD		50 Unit	Rp 733,069,317	
		Terlaksananya penataan batas provinsi Sumatera Utara dengan Aceh	Sumatera Utara	1 Provinsi, 9 kab/kota	Rp 200,000,000	APBD		1 Provinsi, 9 kab/kota	Rp 200,000,000	
		Terlaksananya Penataan Pemutahiran dan Verifikasi Pembakuan nama-nama Rupa Bumi dan Toponimi	Sumatera Utara	99 Orang	Rp 303,805,399	APBD		99 Orang	Rp 400,000,000	
		Terlaksananya Pemutahiran dan Verifikasi penyusunan data wilayah dan kode wilayah administrasi pemerintahan kab/kota	Sumatera Utara	33 Kab/Kota	Rp 298,562,328	APBD		33 Kab/Kota	Rp 298,562,328	
	2).	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kecamatan	Sumatera Utara	132 org	Rp 724,493,319	APBD		132 org	Rp 824,493,319
			Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik kab/kota	Sumatera Utara	33 kab/kota	Rp 974,999,270	APBD		33 kab/kota	Rp 974,999,270
			Terlaksananya Fasilitasi Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Sumatera Utara	33 kab/kota	Rp 300,000,000	APBD		33 kab/kota	Rp 350,000,000
	3).	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 504,283,000	APBD		1 Dokumen	Rp 504,283,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(EKPPD)	Sumatera Utara	100%	Rp 2,948,440,500	APBD		100%	Rp 3,248,440,500
1).	Fasilitasi Admiistrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terfasilitasinya AdministrasiKepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	100%	Rp 1,365,003,250	APBD		100%	Rp 1,465,003,250
2).	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan SPM diProvinsidan Kab/Kota	Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 238,839,500	APBD		1 Dokumen	Rp 338,839,500
3).	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Ringkasan LPPD yang disusun, Jumlah LKPJ Gubsu yang tersusun	Sumatera Utara	1 Dokumen, 1 Laporan	Rp 1,344,597,750	APBD		1 Dokumen, 1 Laporan	Rp 1,444,597,750
3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Tindak LanjutKerjasama yang ditindaklanjuti	Sumatera Utara	100%	Rp 1,276,686,650	APBD		100%	Rp 1,576,686,650
1).	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Persentase Kerjasama dengan Pemerintah yang ditindaklanjuti, Persentase Kunjungan Tamu Asing yangdifasilitasi dan dikoordinasikan	Sumatera Utara	100%	Rp 491,315,000	APBD		100%	Rp 591,315,000
2).	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Persentase Kerjasama dengan Badan Usaha/Swastayang ditindaklanjuti	Sumatera Utara	100%	Rp 386,992,000	APBD		100%	Rp 486,992,000
3).	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan Monitoring yangtersusun terkait Pelaksanaan Kerjasama	Sumatera Utara	1 Dokumen	Rp 398,379,650	APBD		1 Dokumen	Rp 498,379,650

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, berdasarkan perkiraan realistis terhadap kemampuan dan ketersediaan dana maka Renja Tahun 2022 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Adapun rincian program dan kegiatan terlampir sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. Program Kesejahteraan Rakyat

- **FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL**
 1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 2. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- **FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR**
 1. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 2. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
 3. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang kesehatan
- **FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi, kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan tenaga kerja Program.

C. Biro Hukum

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Hukum SetdaprovSU yang direncanakan untuk periode Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 38
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4,997,000,000				4,997,000,000
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,989,257,100				1,989,257,100
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	152,040,000			100%	152,040,000

4	01	01	1.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan OPD	Biro Hukum SetdaprovSU	11 orang	152,040,000	PAD		11 orang	152,040,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				573,615,000				573,615,000
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Biro Hukum SetdaprovSU	50 orang	444,541,000	PAD		50 orang	444,541,000
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	Biro Hukum SetdaprovSU	100 orang	129,074,000	PAD		100 orang	129,074,000
4	01	01	1.06		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			100%	873,071,500			100%	873,071,500
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	48 jenis dan 1000 kotak	152,395,600	PAD		48 jenis dan 1000 kotak	152,395,600
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy	Biro Hukum SetdaprovSU	200000 lembar	20,840,900	PAD		200000 lembar	20,840,900
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Biro Hukum SetdaprovSU	1460 eksaminasi	9,855,000	PAD		1460 eksaminasi	9,855,000

4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Biro Hukum SetdaprovSU	80 kali	689,980,000	PAD		80 kali	689,980,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	379,430,600			100%	379,430,600
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat/paket	Biro Hukum SetdaprovSU	500 surst	3,550,000	PAD		500 surst	3,550,000
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Biro Hukum SetdaprovSU	24 unit	208,015,000	PAD		24 unit	208,015,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	Biro Hukum SetdaprovSU	5 orang	167,865,600	PAD		5 orang	167,865,600
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11,100,000				11,100,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	Biro Hukum SetdaprovSU	100 unit	11,100,000	PAD		100 unit	11,100,000
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				3,007,742,900				3,007,742,900
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-			100%	1,026,958,900			100%	1,026,958,900

					undangan								
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam dan di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	Biro Hukum SetdaprovSU	10 Ranperda, 2 orang, 40 dokumen	344,910,000	PAD		10 Ranperda, 2 orang, 40 dokumen	344,910,000
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	Biro Hukum SetdaprovSU	740 dokumen	100,693,000	PAD		740 dokumen	100,693,000
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi dan Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	Biro Hukum SetdaprovSU	2 dokumen, 10 JDIH	210,763,400	PAD		2 dokumen, 10 JDIH	210,763,400
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Biro Hukum SetdaprovSU	400 dokumen	370,592,500	PAD		400 dokumen	370,592,500
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum			100%	1,980,784,000			100%	1,980,784,000

4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan dan Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	Biro Hukum SetdaprovSU	5 kasus, 20 perkara	566,730,000	PAD		5 kasus, 20 perkara	566,730,000
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM dan Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	Biro Hukum SetdaprovSU	68 dokumen, 24 kasus	1,414,054,000	PAD		68 dokumen, 24 kasus	1,414,054,000
									4,997,000,000				4,997,000,000

D. Biro Perekonomian

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2022 adalah:

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. Pencapaian SPM.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2022 adalah 2 (dua) Program dan 8 Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 39

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN SETDAPROVSU
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE PROGRAM/ KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4	01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	1.350.000.000
4	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan	12 Bulan	500,000,000
4	01 01 1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	12 Bulan	401,580,000
4	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	30 Orang	33.500.000
4	01 01 1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi	30 Orang	33.500.000
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	12 Bulan	719.341.400
4	01 01 1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kinerja Biro Perekonomian 2. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan pelaksanaan rapat	1. 2000 unit 2. 2800 kotak	150.380.400
4	01 01 1.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kinerja Biro Perekonomian	12 bulan	64.090.000
4	01 01 1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 bahan bacaan	11.465.000
4	01 01 1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1. Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2. Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. 30 kali 2. 20 kali	493.406.000
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300 surat	18.612.500
4	01 01 1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dapat didistribusikan	300 unit	26.300.000

4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	16 unit	26.300.000
4	01	01	1.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	16 unit	26.300.000
4	01	06			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	2.800.000.000
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100%	944,651,500
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi/FGD Yang dilaksanakan	1 dokumen 2 Fasilitasi 18 kali 2 kali	379,935,100
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Kebijakan yang dihasilkan Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi / FGD Yang dilaksanakan	33 dokumen 7 dokumen 1 kali 33 kab/kota 5 kali	564,716,400
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100%	893,954,500
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Kebijakan yang dihasilkan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi/FGD Yang dilaksanakan	25 dokumen 2 dokumen 25 kali 2 kali	295,720,100
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Kebijakan yang dihasilkan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	24 dokumen 2 dokumen 24 kali 2 kali	299,628,450

					Jumlah Rapat Koordinasi / FGD Yang dilaksanakan			
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Kebijakan yang dihasilkan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi / FGD Yang dilaksanakan	25 dokumen 2 dokumen 25 kali 2 kali	298,605,950
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Bahan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	2 dokumen	980,385,400
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Kebijakan yang dihasilkan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi / FGD Yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen 10 kali 2 kali	355,234,800
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Kebijakan yang dihasilkan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi/FGD Yang dilaksanakan	2 dokumen 2 dokumen 17 kali 2 kali	327,226,600
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Monitoring yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi/FGD Yang dilaksanakan	1 dokumen 10 kali 2 kali	297,924,000
TOTAL								4,018,325,300

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU yang direncanakan untuk periode Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) Program, dengan anggaran sebesar Rp.5.178.000.000,- yang terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.619.508.638, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.
- b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Rp. 4.558.491.362,- terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

F. Biro Administrasi Pembangunan

F.1. Program

Program Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU yang akan dicapai pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

F.2. Kegiatan

Dari berbagai Program di atas, akan diselenggarakan berbagai rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sesuai dengan pendanaan yang diperoleh setiap tahunnya.

Adapun Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 40

Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
(1)	(2)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makan dan minum rapat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terinformasinya kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan Instansi Terkait
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja biro
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kelancaran tugas administrasi dan keuangan Biro
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Buku Petunjuk Pelaksanaan kegiatan APBD dan Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan APBD Provsu
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Frekuensi Pengendalian kegiatan AOBN Provsu pada OPD/UPT di lingkungan Pemprovsu Persentase penyerapan anggaran APBN (realisasi Fisik dan Keuangan)
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik OPD Pemprovsu

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Secara Rill
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rumusan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik OPD Provsu

G. Biro Organisasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada Program/Kegiatan. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus terukur agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Program dan kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 memiliki 6 (enam) Prgoram (3 Program rutin dan 3 Program Prioritas). Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Biro Organisasi telah melakukan pemappingan Nomenklatur urusan Pemerintah Provinsi berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Rensta) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019–2023. Rencana Kerja Tahun 2021 Biro Organisasi Setdaprovsu mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan berdasarkan hasil mapping memiliki 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan :
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Umum dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan Makan dan Minuman;
 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah; dan
 - Rapat-rapat, kordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan undangan ke dalam daerah.

2. Program Penataan Administrasi Umum dengan kegiatan :
 - a. Penataan Organisasi dengan sub kegiatan
 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - Penataan Analisis jabatan;
 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;
 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan
 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Namun untuk sementara program yang digunakan dalam Renja masih berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada tabel 3.3 (T-C.33) pada lampiran Renja.

H. Biro Umum

Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi pejabaran visi misi yang telah ditetapkan serta mampu mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

- a. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governnace), yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisien ketatalaksanaan dan prosedur kerja pada tingkatan struktur organisasi kerja.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima mudah, dan murah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 79.892.498.720,-
- b. Administrasi Barang Milik Daerah Rp. 649.880.000,-
pada Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 16.170.000.00,-
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 26.646.422.776,-
e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 5.991.030.100,-
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 165.395.036.241,-
g. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 9.464.721.080,-
h. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 5.907.280.071,-

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 292.761.000,-
--	-------------------

Dari uraian diatas, diketahui bahwa APBD yang meliputi pelaksanaan belanja tidak langsung adalah sebesar ***Rp.353.890.684.996,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)*** Sedangkan belanja langsung berupa gaji dan TPP Sekretariat Daerah Provsu, Biro Umum Setdaprovsu hanya mengusulkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk ditampung dalam APBD dan selanjutnya dimasukkan dalam Renja, RKA, dan DPA.

I. Biro Administrasi Pimpinan

I.1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 16.444.000.000.-.

I.2. Kegiatan Prioritas Biro Administrasi Pimpinan

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 2.222.875.111,-
- b. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 1.604.216.000,-
- c. Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 6.676.044.800.-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel 47 Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu.

Tabel 41

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				16,444,000,000	APBD			18,088,400,000
4 01 01 1 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,750,000	APBD			17,325,000
4 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	54 Dokumen	5,250,000	APBD		54 Dokumen	5,775,000
4 01 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Sumatera Utara	50 Eksemplar	10,500,000	APBD		50 Eksemplar	11,550,000

4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,083,010,780	APBD		0%	2,291,311,858
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Sumatera Utara	1 Tahun	2,083,010,780	APBD		1 Tahun	2,291,311,858
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				913,379,055	APBD			1,004,716,961
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	100%	804,179,055	APBD		100%	884,596,961
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	16 Orang	109,200,000	APBD		16 Orang	120,120,000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4,871,344,565	APBD		100%	5,358,479,022
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	150 Unit	114,773,712	APBD		150 Unit	126,251,083
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	150 Jenis	795,341,190	APBD		150 Jenis	874,875,309
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	9 Jenis	163,212,800	APBD		9 Jenis	179,534,080
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sumatera Utara	51 Jenis	394,050,032	APBD		51 Jenis	433,455,035

4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	1000 kali	2,222,875,111			1000 kali	2,445,162,622
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Sumatera Utara	245 Kali	1,181,091,720	APBD		245 Kali	1,299,200,892
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13,000,000	APBD			14,300,000
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	260 Kali	13,000,000	APBD		260 Kali	14,300,000
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				267,254,800	APBD			293,980,280
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	10 Unit	267,254,800	APBD		10 Unit	293,980,280
4	01	01	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				1,604,216,000	APBD			1,764,637,600
4	01	01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Sumatera Utara	100%	258,330,000	APBD		100%	284,163,000
4	01	01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	100%	1,025,000,000	APBD		100%	1,127,500,000
4	01	01	1	13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	100%	320,886,000	APBD		100%	352,974,600
4	01	01	1	14		Fasilitasi Keprotokolan				6,676,044,800	APBD			7,343,649,280

4	01	01	1	14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	100%	1,048,644,800	APBD		100%	1,153,509,280
4	01	01	1	14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	650 Kali	2,900,000,000	APBD		650 Kali	3,190,000,000
4	01	01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	100%	2,727,400,000	APBD		100%	3,000,140,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu Tahun 2022 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 2.498.304.359,-
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-
 - c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 13.400.000,-
 - a. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD, anggaran sebesar Rp. 13.400.000,-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 591.420.766,-
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 97.695.000,-
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp. 398.425.766,-
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 95.300.000,-
4. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran sebesar Rp. 1.486.464.197,-
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 22.690.000,-

- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 204.485.000,-
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran sebesar Rp. 1.259.289.167,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran sebesar Rp. 290.270.000,-
- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran sebesar Rp. 290.270.000,-

II. Program Pemerintahan dan otonomi Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, anggaran sebesar Rp. 4.679.399.276,-
 - a. Fasilitasi Penataan Wilayah, anggaran sebesar Rp. 2.175.623.687,-
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, anggaran sebesar Rp. 1.999.492.589,-
 - c. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, anggaran sebesar Rp. 504.283.000,-
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah, anggaran sebesar Rp. 2.948.440.500,-
 - a. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, anggaran sebesar Rp. 1.365.003.250,-
 - b. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, anggaran sebesar Rp. 238.839.500,-
 - c. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, anggaran sebesar Rp. 1.344.597.750,-
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah, anggaran sebesar Rp. 1.276.686.650,-
 - a. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah, anggaran sebesar Rp. 491.315.000,-
 - b. Fasilitasi Kerjasama badan Usaha/Swasta, anggaran sebesar Rp. 386.992.000,-
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, anggaran sebesar Rp. 398.379.650,-

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU Tahun 2022 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran sebesar Rp. 1.741.352.040,-
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 1.714.352.040,-
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- II. Program Kesejahteraan Rakyat, anggaran sebesar Rp. 438.265.622.251,-
 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, anggaran sebesar Rp. 342.209.193.423,-
 1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 2. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, anggaran sebesar Rp. 95.608.778.662,-
 1. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 2. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
 3. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang kesehatan
 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, anggaran sebesar Rp. 447.650.166,-
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi, kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan tenaga kerja Program.

C. Biro Hukum

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2022 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Biro Hukum Setdaprovsu mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 42
Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4,997,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,989,257,100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152,040,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	152,040,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	573,615,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	444,541,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	129,074,000
Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	873,071,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152,395,600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,840,900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,855,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	689,980,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379,430,600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,550,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208,015,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167,865,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,100,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,100,000

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3,007,742,900
Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1,026,958,900
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	344,910,000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	100,693,000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	210,763,400
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	370,592,500
Fasilitasi Bantuan Hukum	1,980,784,000
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	566,730,000
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1,414,054,000

D. Biro Perekonomian

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2022 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Biro Perekonomian Setdaprovsu mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 43

Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.350.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	401,580,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.500.000
Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	33.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	719.341.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.380.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.090.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	11.465.000

undangan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	493.406.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.612.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.300.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.300.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.300.000
Program Perekonomian dan Pembangunan	2.800.000.000
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	944,651,500
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	379,935,100
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	564,716,400
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	893,954,500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	295,720,100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	299,628,450
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	298,605,950
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	980,385,400
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	355,234,800
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	327,226,600
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	297,924,000
Total	4,018,325,300

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPd.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU Tahun 2022 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 619.508.638, terdiri dari kegiatan-kegiatan:

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 457.605.438, terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 154.539.438,
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 41.300.000,
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Rp. 210.440.000
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.39.400.000, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.39.400.000.
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp.122.503.200, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, sebesar Rp.122.503.200.

II. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.558.491.362, terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, anggaran sebesar Rp.1.418.045.606,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.264.027.056.
 - b. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.365.660.300.
 - c. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.788.358.250,-
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sebesar Rp.1.373.589.056,-
 - a. Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik, sebesar Rp.205.597.056.

- b. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.846.000.000,-
- c. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.321.992.000.
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.1.766.856.700,-
 - a. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.857.136.352.
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.606.370.348,-
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar Rp.303.350.000.

F. Biro Administrasi Pembangunan

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2022 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 44

Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

Program/ Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	650.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	200.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7.513.460.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	843.460.000

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	600.000.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1.900.000.000
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	2.300.000.000
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.400.000.000
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	470.000.000

G. Biro Organisasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman setiap perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019-2023. Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan RKPD, Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019-2023.

Pada Rancangan Akhir RKPD Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 45
Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
I	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH			6,513,175,900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2,064,775,900
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44,000,000

	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	6 dokumen	44,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				550,000,000
	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN pengelola administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 orang	550,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,327,714,850.00
	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	725 buah	88,550,000.00
	02	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	223.496 lbr	203,500,000.00
	03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	200 org	63,815,950.00
	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah rapat kordinasi dan kunsultasi yang diikuti	15 kali	971,848,900.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	110,000,000.00
	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	4 unit	110,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,361,050.00
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan materi yang dibeli	323 dokumen	3,361,050.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29,700,000.00
	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di servise	20 unit	29,700,000.00
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses	100%	4,448,400,000.00
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Penataan Kelembagaan dan Anjab ABK	100 persen	1,540,000,000.00
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Penataan Kelembagaan Provinsi	100 persen	660,000,000.00
	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	100 persen	440,000,000.00
	03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Anjab dan ABK yang tersusun	100 persen	440,000,000.00
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	100 persen	2,908,400,000.00
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pembinaan pelaksanaan RB	100 persen	660,000,000.00
	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pelaksanaan Monev Akuntabilitas Kinerja	100 persen	440,000,000.00
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Pelaksanaan Budaya Kerja	100 persen	440,000,000.00

04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah kebijakan di bidang Ketatalaksanaan yang dikelola	6 Dokumen	770,000,000.00
05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	41 PD Provsu dan 33 Kab/kota	598,400,000.00

H. Biro Umum

Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi pejabaran visi misi yang telah ditetapkan serta mampu mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

- a. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governnace*), yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisien ketatalaksanaan dan prosedur kerja pada tingkatan struktur organisasi kerja.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima mudah, dan murah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 95.686.806.083,-
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 1.318.713.216,-
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 119.596.826.355,-
- d. Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 7.631.000.000,-
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 44.370.968.448,-
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 99.885.180.922,-
- g. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 10.691.148.920,-
- h. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Rp. 12.433.486.025,-

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 301.392.054.911,-

Dari uraian diatas, diketahui bahwa APBD yang meliputi pelaksanaan belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp.710.921.166.886,-** (*Tujuh Ratus Sepulu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

I. Biro Administrasi Pimpinan

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu Tahun 2023 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Rancangan awal Renja Tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 46

Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.000.000.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	21.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.357.760.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	2.357.760.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.084.904.055
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	903.704.055
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	181.200.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.845.474.345
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.773.712
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	795.341.190
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.212.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.223.125.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1.149.021.643
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	384.754.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	384.754.800
7	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.089.062.000
	Penyiapan Materi Pimpinan	441.712.000
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	1.025.000.000
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	622.350.000
8	Fasilitasi Keprotokolan	6.176.044.800
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.048.644.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.900.000.000
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.227.400.000

BAB V PENUTUP

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta indikasi kegiatan. Renja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Biro-biro di lingkungan SetdaprovSU serta Indikator Kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan tupoksi dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan OPD, instansi vertikal maupun mitra kerja.

Rencana Kerja ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu Renja bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif tersebut, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Akhirnya rumusan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Medan, 2022

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**H. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002**